

**PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH BANK
INDONESIA DAN TINGKAT KONSUMSI TERHADAP
INFLASI DI INDONESIA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata 1 Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Langsa

**OLEH
MUTIA MAULIDA
NIM. 4022015021**



**PROGRAM STUDI
S1 EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
LANGSA
2017**

PERSETUJUAN

Skripsi Berjudul:

**PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH BANK
INDONESIA DAN TINGKAT KONSUMSI TERHADAP
INFLASI DI INDONESIA**

Oleh:

Mutia Maulida

NIM. 4022015021

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Pada Program Studi Ekonomi Syariah

Langsa, 04 November 2019

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002



Ade Fadilla FW Pospos, M.A
NIP. 19880407 201903 2 010

Mengetahui

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



FAKHRIZAL, Lc., MA
NIP. 19850218 201801 1 001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul “PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH BANK INDONESIA DAN TINGKAT KONSUMSI TERHADAP INFLASI DI INDONESIA” atas nama Mutia Maulida, NIM 4022015021 Program Studi Ekonomi Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa pada tanggal 14 November 2019. Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE) pada Program Studi Ekonomi Syariah.

Langsa, 14 November 2019

Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi

Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Institut Agama Islam Negeri Langsa

Penguji I

Dr. Safwan Kamal, M.E.I
NIDN. 2018059002

Penguji II

Ade Fadilla FW Pospos, M.A
NIP. 19880407 201903 2 010

Penguji III

Abdul Hamid, M.A
NIP. 19730731 200801 1 007

Penguji IV

Fakhrizal, Lc, MA
NIP. 19850218 201801 1 001

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Langsa



(DR. Iskandar, MCL)

NIP. 19650616 1995031 002

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Maulida
NIM : 4022015021
Tempat, Tanggal Lahir : Peureulak, 29 September 1998
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Desa Leuge, Gang. Masjid, Kec. Peureulak Kota,
Kab. Aceh Timur

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul **“Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Bank Indonesia Dan Tingkat Konsumsi Terhadap Inflasi Di Indonesia”** benar karya asli saya, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya. Apabila terdapat kesalahan dan kekeliruan di dalamnya, sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Langsa, 04 November 2019

Yang membuat pernyataan



Mutia Maulida

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

**Nikmati hidup dan berjuanglah “Karena sesungguhnya
sesudah kesulitan itu ada kemudahan”
(QS. Al-Isyirah: 5-6)**

**“...Berusaha sebagai manusia,
berdoa sebagai seorang hamba...”**

Karya ini kupersembahkan untuk:

- ❖ Ibu dan Ayah tercinta.
- ❖ Kakak dan Adik ku tersayang
- ❖ Sahabat - sahabat ku.
- ❖ Untuk Almamater kebanggaanku.

ABSTRAKS

Abstrak: Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Tingkat Konsumsi Terhadap Inflasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh dari sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS), konsumsi rumah tangga dan konsumsi pemerintah terhadap inflasi di indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SBIS jangka pendek memiliki dampak negatif/tidak berpengaruh terhadap inflasi, sebaliknya FASBIS berpengaruh terhadap inflasi, konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap inflasi, dan konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap inflasi. Dalam jangka panjang SBIS, FASBIS, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah berdampak negatif terhadap inflasi.

Kata Kunci: Inflasi, SBIS, FASBIS, konsumsi rumah tangga, dan konsumsi pemerintah.

ABSTRACT

Abstract: *Effect of Sharia Monetary Instruments and Consumption Rates on Inflation.* The purpose of this study was to analyze the effect of the Indonesian Islamic Bank Certificate (SBIS), the Indonesian Islamic Bank Deposit Facility (FASBIS), household consumption and government consumption on inflation in Indonesia. The method used in this study is the classic assumption test model and multiple linear regression analysis. The results showed that short-term SBIS has a negative effect / does not affect inflation, on the contrary FASBIS has an effect on inflation, household consumption has an effect on inflation, and government consumption has an effect on inflation. In the long run SBIS, FASBIS, household consumption, and government consumption have a negative impact on inflation.

Keyword: *Inflation, SBIS, FASBIS, household consumption, and government consumption.*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya maka peneliti dapat menyelesaikan Skripsidengan judul, **“PENGARUH INSTRUMEN MONETER SYARIAH BANK INDONESIA DAN TINGKAT KONSUMSI TERHADAP INFLASI DI INDONESIA”** dengan baik. Salawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia menuju alam berilmu pengetahuan.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu syarat mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa, serta selesai berkat bantuan dan bimbingan yang sangat berarti dari berbagai pihak. Pada kesempatan baik ini, perkenankan peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta yang telah memberikan dukungan moral dan materil tanpa henti-hentinya pada peneliti.
2. Bapak Dr. Iskandar Budiman, M.CL. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
3. Bapak. FAKHRIZAL, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa.
4. Bapak Dr. Safwan Kamal, M.E.I selaku Pembimbing I bagi peneliti.
5. Ibu Ade Fadilla FW Pospos, M.A sebagai Pembimbing II bagi peneliti.
6. Teman-teman Mahasiswa Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa dan seluruh pihak yang ikut membantu dan memberikan dukungan serta masukan demi selesainya skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semua bantuan tersebut peneliti kembalikan kepada Allah SWT. untuk dapat diberikan imbalan berupa pahala yang setimpal dengan besarnya bantuan yang telah diberikan kepada peneliti.

Apabila nantinya terdapat kekurangan dan kesilapan dalam penulisan Skripsi ini akibat dari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan peneliti, panneliti mengharapkan masukan yang bersifat membangun guna memperbaiki penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya.

Akhir kata, kepada Allah SWT. kita berserah diri. Semoga Skripsi inidapat bermanfaat bagi semua pihak. Wassalam.

Langsa, 04 November 2019

Peneliti

Mutia Maulida
NIM. 4022015021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan transliterasinya.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ś	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	S	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	D	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal.

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atauharkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	A	A
—	Kasrah	I	L
—	Dammah	U	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ي' —	Fathah dan ya	Ai	a dan i
و —	Fathah dan waw	Au	a dan u

c. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
—	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ي —	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و----	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

d. Ta marbūtah.

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

1) ta marbutah hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) ta marbūtah mati

Ta marbūtah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

e. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

f. Kata Sandang.

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ۷, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang di ikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

- Ar-rajulu : الرجل
- As-sayyidatu: السيدة
- Al-qalamu : القلم

g. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif

Contoh :

- Ta'khuzuna : تاخذن
- An-nau' : النوء
- Syai'un : شئى

h. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim (kata benda) maupun harf, ditulisterpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya:

Contoh :

- Wainnallāhalahuakhairar-rāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Wainnallāhalahuakhairurrāziqīn : وان الله اهو خير الر ازقين
- Faaufū al-kailawa al-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Faaufū al-kailawal-mīzāna : فاوفو الكيل والميزان
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Ibrāhīm al-Khalīl : ابراهيم الخليل
- Bismillāhimajrehāwamursāhā : بسم الله مجر اها ومر سها
- Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti : والله على الناس حخ البيت

i. Huruf Kapital

Meskipun dalam system tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: Huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri sendiri, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- Wamā Muhammadunillārasūl
- Walaqadra'āhubil-ufuqil-mubin

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh:

- Nasrunminallāhiwafathunqarib
- Lillāhi al-amrujami'an

j. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman tranliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu, peresmian pedoman tranliterasi ini perlu disertai dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
ABSTRAKS	iv
ABSTRACT	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR GRAFIK	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	12
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	14
1.5 Penjelasan Istilah	14
1.6 Sistematika Penulisan	15
BAB II. KAJIAN TEORITIS.....	17
2.1 Inflasi	17
2.1.1 Definisi Inflasi	17
2.1.2 Jenis-Jenis Inflasi	18
2.1.3 Teori Inflasi	21
2.1.4 Perhitungan Inflasi	25
2.1.5 Indikator Inflasi	26
2.1.6 Dampak Inflasi	27
2.2 Instrumen Moneter Syariah	28
2.2.1 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	32
2.2.2 Karakteristik Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	34
2.2.3 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	35
2.3 Konsumsi	38
2.3.1 Pengertian Konsumsi.....	38
2.3.2 Fungsi Konsumsi.....	39
2.3.3 Tujuan Konsumsi	40
2.3.4 Teori Konsumsi	40
2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi	42
2.3.6 Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga.....	45
2.3.7 Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Masyarakat.....	47
2.4 Penelitian Terdahulu	49
2.5 Kerangka Pemikiran	54
2.6 Hipotesis	55

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	57
3.1 Pendekatan Penelitian.....	57
3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian	57
3.3 Populasi Dan Sampel.....	58
3.4 Data Penelitian	59
3.5 Variabel-Variabel Penelitian	60
3.5.1 Variabel Dependen.....	60
3.5.2 Variabel Independen	60
3.6 Metode Analisis Data	60
3.6.1 Uji Asumsi Klasik	60
3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda	63
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	66
4.1 Hasil Penelitian.....	66
4.1.1 Gambaran Umum Pasar Modal Indonesia	66
4.1.2 visi misi bank indonesia	68
4.2 Data Penelitian.....	69
4.3 Pergerakan Variabel Penelitian.....	71
4.3.1 Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	71
4.3.2 Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	73
4.3.3 Tingkat Konsumsi Rumah Tangga.....	75
4.3.4 Tingkat Konsumsi Pemerintah	76
4.3.5 Inflasi	77
4.4 Analisis Data.....	79
4.4.1 Uji Asumsi Klasik	79
4.4.2 Analisis Regresi Linear Berganda.....	85
4.4.3 Uji Hipotesis.....	87
4.5 Analisis Hasil Penelitian.....	91
4.5.1 Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia	91
4.5.2 Analisis Pengaruh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Terhadap Inflasi Di Indonesia	93
4.5.3 Analisis Pengaruh Tingkat Konsumsi Rumah Tangga Terhadap Inflasi Di Indonesia	94
4.5.4 Analisis Pengaruh Tingkat Konsumsi Pemerintah Terhadap Inflasi Di Indonesia	94
4.5.5 Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga Dn Konsumsi Pemerintah Terhadap Inflasi	96
BAB V. PENUTUP	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	103
LAMPIRAN	104

DAFTAR GRAFIK

Grafik 4.1	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).....	72
Grafik 4.2	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	73
Grafik 4.3	Tingkat Konsumsi Rumah Tangga	75
Grafik 4.4	Tingkat Konsumsi Pemerintah	76
Grafik 4.5	Inflasi	78
Grafik 4.6	Uji Normalitas	81

DAFTAR TABEL

Tabel1.1	Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu	51
Tabel3.1	Pengambilan Keputusan Ada Tidaknya Autokolerasi	63
Tabel4.1	Data Kuantitatif SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah Dan Inflasi Pertahun Dalam Triwulan 2015-2016.....	69
Tabel4.2	Hasil Uji Normalitas.....	79
Tabel4.3	Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
Tabel4.4	Hasil Uji Autokolerasi.....	85
Tabel 4.5	Hasil Perhitungan Hipotesis Uji T	86
Tabel 4.6	Hasil Perhitungan Uji F.....	90
Tabel 4.7	Hasil Uji Koefisien Determinasi R^2	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir	55
Gambar 4.1 Uji Normalitas P-Plot	80
Gambar 4.2 Uji Heterokedastisitas	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam perspektif ekonomi, inflasi merupakan fenomena moneter dalam suatu negara dimana naik turunnya inflasi cenderung mengakibatkan terjadinya gejolak ekonomi.¹ Ataupun sebagai salah satu peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum yang berarti terjadinya penurunan nilai uang, inflasi dapat terjadi karena faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan inflasi timbul karena adanya tekanan dari sisi, misalnya dari sisi penawaran (*cost-push inflation*) dan dari sisi permintaan (*demand-pull inflation*).² *Cost-push inflation* disebabkan oleh turunnya produksi karena naiknya biaya produksi (naiknya biaya produksi dapat terjadi karena tidak efisiennya perusahaan, nilai kurs mata uang negara yang bersangkutan jatuh, kenaikan harga bahan baku industri, adanya tuntutan kenaikan upah dari serikat buruh yang kuat, dan sebagainya. *Demand-pull inflation* dapat disebabkan oleh adanya kenaikan permintaan agregat (AD) yang terlalu besar atau pesat dibandingkan dengan penawaran produksi agregat.³

Sedangkan dalam sistem ekonomi Islam inflasi bukan merupakan suatu masalah utama ekonomi secara agregat, karena mata uangnya stabil dengan digunakannya mata uang dinar dan dirham. Penurunan nilai masih mungkin

¹Engla Desnim Silvia, Dkk, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. I, No. 02 Januari 201, Hlm. 224

²Judisseno, "*Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*", (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002), Hlm. 52

³Budiono, "*Ekonomi Moneter*", (Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM, 2009), Hlm. 168

terjadi, yaitu ketika nilai emas yang menopang nilai nominal dinar itu mengalami penurunan, diantaranya akibat ditemukannya emas dalam jumlah yang besar, tapi keadaan ini kecil sekali kemungkinannya. Menurut para ekonomi Islam, inflasi berakibat sangat buruk bagi perekonomian karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama terhadap fungsi tabungan, fungsi dari pembayaran di muka, dan fungsi dari unit perhitungan. Melemahkan semangat menabung dan sikap terhadap menabung dari masyarakat. Meningkatkan kecenderungan untuk berbelanja terutama untuk non-primer dan barang-barang mewah.⁴

Sejumlah teori telah dikembangkan untuk menjelaskan gejala inflasi. Menurut pandangan monetaris, yaitu adam smith penyebab utama inflasi adalah kelebihan penawaran uang dibandingkan yang diminta oleh masyarakat. Sedangkan golongan non monetaris, yaitu keynesian, tidak menyangkal pendapat pandangan monetaris tetapi menambahkan bahwa tanpa ekspansi uang beredar, kelebihan permintaan agregat dapat saja terjadi jika terjadi kenaikan pengeluaran konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah atau ekspor netto. Dengan demikian inflasi dapat disebabkan oleh faktor-faktor moneter dan non moneter.⁵ Sehingga dengan ajaran tersebut seluruh manusia diperintahkan untuk melakukan kebutuhan sesuai dengan kadar kebutuhannya sebagai bekal dunia dan akhirat. Allah berfirman dalam surat Al-An'am yang berbunyi:

⁴Idris Parakkasi, "*Pasar, Uang, Transaksi*", Laa Maisyir, Dalam Jurnal Volume 3, Nomor 1, Juni 2016, Hlm. 45

⁵Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, *Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol 8, NO. 2, September 2012, Hlm. 85-10.

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُمُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ١٤١﴾

Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. (QS.Al-An'am: 141)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah SWT memerintahkan bahwa kita dilarang berlebih-lebihan dalam berbagai hal pada harta dan kekayaan cukup memakai suatu harta dan kekayaan sesuai dengan kebutuhan kita dan kita dilarang untuk berfoya-foya lebih baik harta dan kekayaan yang lebih itu diutamakan bersedekah kepada fakir-miskin yang membutuhkan, karena ayat tersebut juga menjelaskan bahwa berlebih-lebihan itu hal yang tidak disukai oleh Allah SWT. Oleh karena itu pergunakanlah harta dan kekayaan sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing.

Untuk mengantisipasi semakin tingginya perubahan inflasi, mendorong otoritas moneter membuat kerangka kerja kebijakan moneter atau dengan kata lain *Inflation Targetting Framework* (ITF) yang berlandaskan hukum kebijakan Bank Indonesia ini adalah UU No. 23 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dengan bertujuan untuk menjaga dan mencapai perubahan inflasi yang rendah dan stabil, dimana kestabilan inflasi ialah hal yang sangat penting untuk menjaga kestabilan ekonomi nasional agar tetap dalam batasan yang aman dan sesuai yang diharapkan dengan kebijakan ini, Bank Indonesia secara tegas mengumumkan sasaran inflasi

kepada publik dan kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai sasaran inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.⁶ Pemerintah menggunakan kebijakan moneter sebagai pengendali inflasi, yaitu stabilisasi harga. Oleh karena itu dibutuhkan adanya mekanisme transmisi kebijakan moneter beserta instrumen-instrumen yang digunakan. Terbentuknya sistem moneter syariah diharapkan menjadi solusi dari kegagalan yang diakibatkan oleh sistem moneter konvensional yang terpaku pada sistem bunga. Sistem bunga membawa kegiatan perekonomian dalam tindak spekulasi yang akan menghambat perekonomian sektor riil untuk berkembang dan akhirnya pertumbuhan ekonomi tidak berdiri dengan kuat atau rapuh meskipun angka pertumbuhan ekonomi tinggi. Asumsinya adalah dengan adanya kebijakan moneter syariah, kebijakan moneter khususnya di Indonesia akan terbebas dari sistem bunga dan diharapkan dapat mencapai tujuan moneter yang lebih baik.⁷

Inflasi yang rendah dan stabil dapat tercapai ketika berbagai hambatan yang berkontribusi atas terciptanya inflasi dapat diminimalkan. Kendala dan permasalahan yang masih menjadi pekerjaan rumah, di antaranya adalah biaya distribusi yang tinggi, rendahnya efisiensi produksi, dan akses pembiayaan yang mahal. Selain itu, faktor struktur pasar yang tidak sempurna, juga turut memicu kenaikan harga barang. Hambatan-hambatan tersebut pada akhirnya memengaruhi daya saing produk domestik.⁸ Seperti yang terjadi inflasi di Indonesia berada di bawah target yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut dapat

⁶Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.

⁷Farah Fauziyah, *Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Efisiensi Bank Pembangunan Daerah..., Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015.

⁸*Ibid*, Hlm. 2

disebabkan oleh laju inflasi terhadap kelompok barang dan jasa yang dapat mempengaruhi inflasi di Indonesia.

Kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral akan mempengaruhi perkembangan suku bunga, yakni salah satunya akan mempengaruhi suku bunga jangka pendek seperti suku bunga SBI. Kemudian perubahan ini akan memberikan pengaruh suku bunga deposito yang ditawarkan bank konvensional kepada masyarakat penabung dan pada suku bunga kredit yang dibebankan bank konvensional kepada para debiturnya. Para pengusaha hanya akan melaksanakan keinginan untuk menanam modal apabila tingkat pengembalian modal dari investasi yang dilakukan, yaitu persentasi keuntungan yang akan diperoleh sebelum dikurangi bunga uang yang dibayar, lebih besar dari bunga. Ketika bank konvensional menawarkan tingkat bunga yang lebih rendah daripada bagi hasil yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah yang kekurangan dana akan melakukan peminjaman uang pada bank konvensional. Namun apabila bank konvensional menawarkan tingkat suku bunga yang lebih tinggi dari pada bagi hasil pembiayaan yang ditawarkan oleh bank syariah, maka nasabah akan melakukan pembiayaan pada bank syariah. Hal ini menyebabkan semakin banyaknya masyarakat yang melakukan pembiayaan kepada bank syariah maka semakin terlaksana pengelolaan modal oleh bank syariah dan semakin banyaknya modal yang dikelola maka semakin besar pendapatan yang diperoleh oleh bank syariah dari nasabah penyaluran dana atau pembiayaan. Maka bagi hasil yang

diberikan kepada nasabah penghimpunan dana atau deposito maupun tabungan akan semakin tinggi.⁹

Dengan adanya instrumen moneter diharapkan tingkat konsumsi terhadap inflasi bisa ditekan, instrumen moneter yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan instrumen suku bunga. Namun pada kenyataannya suku bunga ini sangat terpengaruh dengan gejolak perekonomian, sehingga terkadang suku bunga ini malah menjadi salah satu pencetus adanya krisis ekonomi yang terjadi disuatu negara. Oleh karena itu instrumen moneter syariah merupakan salah satu jawaban dari permasalahan tersebut, dalam instrumen moneter syariah tidak dikenal adanya sistem bunga. Instrumen-instrumen yang digunakan dalam moneter syariah juga berbeda dengan instrumen moneter pada umumnya karena tidak dikenalnya sistem bunga tersebut. Namun justru dengan tidak dikenalnya sistem bunga tersebut menjadikan kebijakan moneter syariah lebih tahan terhadap gejolak perekonomian sehingga pada akhirnya tujuan akhir dari instrumen moneter dapat tercapai.¹⁰

Senada dengan teori di atas, dapat diketahui pula bahwa acuan suku bunga di Indonesia adalah Sertifikat Bank Indonesia (SBI) untuk yang konvensional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) untuk yang syariah. Besaran bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) maupun tingkat imbal hasil Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) juga dipengaruhi oleh besarnya tekanan laju inflasi. Karena inflasi menjadi indikator utama pembentukan suku bunga maupun imbal hasil terhadap produk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Sertifikat Bank

⁹Tri Inda Fadhila Rahma, "Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga", Dalam Jurnal j-EBIS Vol. 3 No. 1 April 2018, Hlm. 3

¹⁰https://www.academia.edu/8038591/Kebijakan_Moneter_Syariah

Indonesia Syariah (SBIS) merupakan instrumen kebijakan moneter yang ditetapkan Bank Indonesia sebagai pengganti dari Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI). Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) merupakan instrumen kebijakan moneter yang pertama kali ditetapkan Bank Indonesia dalam sistem perbankan syariah di Indonesia sebagai instrumen penyerap likuiditas layaknya bank konvensional.¹¹

Sesuai pada tanggal 31 Maret 2008 diberlakukanlah Sertifikat Bank Indonesia Syariah setelah Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No. 10/11/PBI/2008 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah. Peraturan tersebut dikeluarkan setelah Bank Indonesia mendapat izin dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia berdasarkan fatwa DSN MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah dan fatwa DSN-MUI No. 64/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah Ju'alah. Dengan menggunakan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sebagai instrument moneter konvensional dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen moneter syariah. Dengan Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) bank sentral melakukan kegiatan jual beli surat-surat berharga dengan pelaku pasar, baik di pasar primer maupun sekunder yang dijadikan instrumen operasional tidak langsung utama pengendalian moneter.¹²

Fasilitas simpanan bank indonesia syariah juga merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam

¹¹Desi Nurmaida, "Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi", Dalam Jurnal j-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 2018, Hlm. 165-166

¹² Farah Fauziyah, "Efisiensi Bank Pembangunan Daerah...", Dalam Jurnal Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015, Hlm. 85-86

rangka OMS. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah.¹³

Konsumsi adalah salah satu faktor penting dalam perekonomian. Kegiatan konsumsi tidak bisa lepas dari kegiatan masyarakat karena semua orang pasti melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ataupun konsumsi adalah barang atau jasa yang dibeli oleh rumah tangga konsumsi terdiri dari barang tidak tahan lama (*Non Durable Goods*) pertama adalah barang yang habis dipakai dalam waktu pendek, seperti makanan dan pakaian, kedua adalah barang tahan lama (*Durable Goods*) adalah barang yang dimiliki usia panjang seperti mobil, televisi, alat-alat elektronik, ketiga adalah jasa (*Services*) meliputi pekerjaan yang dilakukan untuk konsumen oleh individu dan perusahaan seperti potong rambut dan berobat ke dokter.¹⁴

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat

¹³ https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_174315.pdf

¹⁴Siti Rahmiana, "Analisis Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Konsumsi Daerah, Investasi Daerah Dan Suku Bunga Kredit Investasi Daerah Terhadap Inflasi Di Provinsi Lampung", Skripsi, Lampung, 2016, Hlm. 8

penghasilan rumah tangga. makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non makanan. Rata-rata pengeluaran rumah tangga dapat digunakan untuk melihat pola konsumsi dan tingkat kesejahteraan dari rumah tangga yang bersangkutan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup semua pengeluaran untuk konsumsi barang dan jasa.¹⁵

Dan sedangkan dalam Ilmu ekonomi Islam pada dasarnya mencakup tiga aspek, yaitu: Konsumsi yaitu komoditas apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan masalah, Produksi yaitu bagaimana komoditas yang dibutuhkan itu dihasilkan agar masalah tercapai dan, Distribusi, yaitu bagaimana sumber daya dan komoditas di distribusikan di masyarakat agar setiap individu dapat mencapai masalah. Ketiga aspek konsumsi, produksi, dan distribusi merupakan kesatuan integral untuk mewujudkan masalah kehidupan. Kegiatan konsumsi, produksi, dan distribusi harus menuju pada satu tujuan yang sama, yaitu mencapai masalah yang maksimum bagi umat manusia bukan untuk mencapai kepuasan maksimum (*maximum utility*) seperti ajaran Mazhab Neo-Klasik Dalam tulisan ini akan

¹⁵Muhammad Rafiq, “Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2001:T1-2010:T4”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2016, Hlm. 5

dibahas masalah konsumsi baik ditinjau dari ekonomi konvensional maupun ekonomi Islam serta implikasinya terhadap kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Tingginya konsumsi juga dipengaruhi oleh pendapatan, semakin besar pendapatan seseorang maka akan semakin besar pula pengeluaran konsumsi. Perbandingan besarnya pengeluaran konsumsi terhadap tambahan pendapatan disebut dengan hasrat marjinal berkonsumsi (*Marginal Propensity to Consume, MPC*). yang dalam klasifikasinya pengeluaran konsumsi rumah tangga terdapat konsumsi minimum bagi rumah tangga tersebut, yaitu besarnya pengeluaran konsumsi yang harus dilakukan, walaupun tidak ada pendapatan. Pengeluaran konsumsi rumah tangga ini disebut pengeluaran konsumsi otonom (*outonomous consumption*).¹⁷

Adapun faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan jumlah pengeluaran untuk konsumsi adalah pendapatan disposibel sebagai faktor utama, pendapatan permanen dan pendapatan menurut daur hidup, kekayaan serta faktor permanen lainnya seperti faktor sosial dan harapan tentang kondisi ekonomi dimasa datang. Pendekatan pendapatan permanen dan pendekatan daur hidup mengasumsikan bahwa rumah tangga membagi konsumsinya antara masa sekarang dan masa yang akan datang berdasarkan perkiraan kemampuan konsumsi dalam jangka panjang. Rumah tangga mencoba untuk mempertahankan konsumsi dengan menyimpan sebagian pendapatannya untuk masa pensiun.

¹⁶ Ahmad Muslim, *Peranan Konsumsi Dalam Perekonomian Indonesia Dan Kaitannya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 1, No. 2, September 2011, Hlm. 71

¹⁷M.Fikri, Amri Amir, Erni Achmad, *Analisis Konsumsi Masyarakat Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 2, Oktober 2013, Hlm. 165

Pendapatan yang disisihkan dalam bentuk tabungan atau deposito tercermin pada jumlah uang kuasi yang ada sektor perbankan. Selain itu rumah tangga memilih tingkat konsumsinya berdasarkan atas kekayaan yang dimiliki. Tingkat bunga deposito bank pemerintah di Indonesia berfluktuasi dan cenderung mengalami penurunan.¹⁸

Pengeluaran pemerintah dinegara berkembang pada umumnya relatif besar. Dinegara-negara berkembang pengeluaran terbesar dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur yang merupakan barang publik murni yang tidak dapat dihasilkan oleh pihak swasta seperti energi, pertahanan, juga untuk membiayai kegiatan sosial seperti : pendidikan, kesehatan dan lain-lain. Besarnya pengeluaran pemerintah menjadi suatu yang mengandung kontroversi pada ekonomi makro, sementara negara-negara bergerak menuju pasar terbuka dan bebas, pengeluaran pemerintah juga meningkat secara terus-menerus.¹⁹

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor,

¹⁸ Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, Ali Anis, *Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02, Hlm. 5

¹⁹ Triyanto, "Analisis Pengaruh Konsumsi Pemerintah, Ekspor, Tabungan Domestik Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia", Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009, Hlm. 5

belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain. Pengeluaran konsumsi yaitu pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.²⁰

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Bank Indonesia Dan Tingkat Konsumsi Terhadap Inflasi Di Indonesia*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sertifikat bank indonesia syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia?
2. Bagaimana fasilitas simpanan bank indonesia syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia?
3. Bagaimana tingkat konsumsi rumah tangga secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia?

²⁰ Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng, “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado*” Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 8

4. Bagaimana tingkat konsumsi pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia?
5. Bagaimana sertifikat bank indonesia syariah, fasilitas simpanan bank indonesia syariah, tingkat konsumsi rumah tangga, dan tingkat konsumsi pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan di atas, maka ada beberapa tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui sertifikat bank indonesia syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
2. Untuk mengetahui fasilitas simpanan bank indonesia syariah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia
3. Untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia.
4. Untuk mengetahui tingkat konsumsi pemerintah secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia
5. Untuk mengetahui sertifikat bank indonesia syariah, fasilitas simpanan bank indonesia syariah, tingkat konsumsi rumah tangga, dan tingkat konsum si pemerintah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap inflasi di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan dan tujuan, maka manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang ekonomi khususnya terhadap dampak kebijakan moneter bank indonesia, konsumsi daerah, dan investasi daerah berpengaruh terhadap inflasi di Kota Lhokseumawe.
2. Bagi pihak lain, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan juga dapat sebagai bacaan yang bermanfaat bagi yang memerlukan.
3. Bagi fakultas, hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai bahan referensi untuk pengembangan kualitas pendidikan fakultas selanjutnya di masa depan.
4. Bagi perusahaan, adanya input informasi bagi perusahaan yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, serta dapat dijadikan pedoman untuk melakukan perbaikan saat ini maupun masa yang akan datang.

1.5 Penjelasan Istilah

1. Inflasi adalah suatu gejala di mana tingkat harga barang dan jasa secara umum mengalami kenaikan secara terus menerus, Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat dikatakan inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas atau mengakibatkan kenaikan harga pada barang lainnya.²¹

²¹Muana Nanga, "*Makro Ekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan*", (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), Hlm. 241.

2. SBIS merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dalam rangka meningkatkan efektifitas mekanisme transmisi moneter dengan prinsip syariah.²²
3. FASBIS merupakan fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah.²³
4. Konsumsi Rumah Tangga adalah tingkat pengeluaran yang harus dipenuhi oleh keluarga guna untuk menjalankan fungsi dari sebuah keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.²⁴
5. Konsumsi Pemerintah adalah pengeluaran rutin negara dalam hal ini belanja pegawai yang mencakup gaji dan pensiun, tunjangan serta belanja barang-barang dalam negeri, dana rutin daerah dan pengeluaran rutin lainnya yang berdampak konsumsi pegawai atau masyarakat terhadap barang-barang meningkat yang kemudian menaikkan fungsi konsumsi yang menyumbang kontribusi terhadap bruto nasional dan pertumbuhan ekonomi.²⁵

1.6 Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini akan disajikan dalam sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, yaitu:

²²Dendy S, Tanti N, Deni L , “*Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Konvensional*”, dalam Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4 No.1 Tahun 2016, Hlm. 2

²³ https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_174315.pdf

²⁴ Abu Ahmadi, “*Ilmu Sosial Dasar*,,,,,,”, hlm. 89-91

²⁵ Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng, “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado*” Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 8

- BAB I :PENDAHULUAN, Bab ini menguraikan tentang tentang pokok pikiran penyusunan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan istilah dan sistematika penulisan penelitian.
- BAB II :LANDASAN TEORI, Bab ini berisi tentang penjelasan pengertian inflasi, jenis-jenis inflasi, teori inflasi, perhitungan inflasi, indikator inflasi, dampak inflasi, instrumen moneter syariah, sertifikat bank indonesia syariah, karakteristik sertifikat bank indonesia syariah, fasilitas simpanan bank indonesia syariah, pengertian konsumsi, fungsi konsumsi, tujuan konsumsi, teori konsumsi, faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi, faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah tangga, faktor yang mempengaruhi konsumsi pemerintah penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dan hipotesis.
- BAB III :METODOLOGI PENELITIAN, Bab ini berisi tentang gambaran metodologi penelitian yaitu pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, data penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisis data, teknik pengumpulan data, uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda.
- BAB IV :HASIL DAN PEMBAHASAN, Bab ini berisi uraian tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil serta analisis objek penelitian.
- BAB V :PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pembahasan dan saran-saran bagi pihak yang berkepentingan.

BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Inflasi

2.1.1 Definisi Inflasi

Inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus, ini tidak berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik dengan persentase yang sama mungkin dapat terjadi kenaikan harga tersebut tidak bersamaan karena terdapat kenaikan harga umum barang secara terus menerus selama satu periode tertentu. Kenaikan yang terjadi hanya sekali saja, meskipun dengan persentase yang cukup besar bukanlah merupakan inflasi.²⁶

Teori klasik menganut paham monetaris. Teori ini menyatakan bahwa penawaran (*supply*) uang atau jumlah uang beredar dalam perekonomian memiliki hubungan langsung dengan perubahan tingkat harga. Peningkatan jumlah uang beredar akan mendorong tingkat harga bergerak ke atas, demikian pula sebaliknya. Dengan alasan inilah Teori Klasik disebut juga dengan Teori Kuantitas Uang (*Quantity Theory Of Money*). Secara lebih spesifik, teori klasik menjelaskan bahwa tingkat harga secara umum ditentukan dari interaksi antara penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*) dari uang. Apabila tingkat harga berada di atas tingkat keseimbangan, maka jumlah uang yang diminta masyarakat lebih tinggi dibandingkan jumlah uang yang diterbitkan oleh bank sentral, sehingga pada akhirnya tingkat harga akan turun menuju tingkat keseimbangan,

²⁶ Idris Parakkasi, “*Inflasi Dalam Perspektif Islam*”, Dalam Jurnal *Laa Maisyir*, Vol 3, NO. 1, Juni 2016: 41-58

begitu pula sebaliknya. Sedangkan pada tingkat harga keseimbangan, maka jumlah kuantitas uang yang ingin dipegang oleh masyarakat jumlahnya persis sama dengan tingkat kuantitas uang yang diedarkan oleh bank sentral.²⁷

Maka dapat disimpulkan bahwa inflasi adalah suatu keadaan dimana terdapat kecenderungan kenaikan harga barang dan jasa secara umum serta berlangsung secara terus-menerus yang diakibatkan oleh ketidak seimbangan arus barang dan uang dalam suatu perekonomian, seperti kenaikan harga pada pada saat menjelang hari raya idul fitri, hari raya idul adha, natal atau tahun baru tidak bisa disebut dengan inflasi karena kenaikan tersebut bersifat sementara dan tidak memiliki pengaruh lanjutan sehingga kenaikan harga semacam ini tidak dianggap inflasi karena kenaikan ini tidak berlangsung secara terus-menerus hanya saja terjadi saat itu saja. Namun yang dimaksud dengan inflasi ialah dimana terjadinya kenaikan harga suatu barang atau jasa yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagai barang dan jasa terlalu kuat hingga terjadinya infasi terhadap barang dan jasa tersebut maka perlu adanya tindakan dari pemerintah untuk dapat mengendalikannya yaitu dengan kebijakan moneter untuk menstabilkan kembali perekonomian.

2.1.2 Jenis-Jenis Inflasi

Inflasi yang terjadi dapat dikelompokkan berdasarkan sifat, sebab terjadinya, dan berdasarkan asalnya:²⁸

²⁷G.A. Diah Utari, Retni Cristina S, Sudiro Pambudi, “*Inflasi Di Indonesia : Karakteristik Dan Pengendaliannya*”, (Jakarta : BI Institute, 2016), Hlm. 8

²⁸Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, “*Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*”, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), Hal. 112.

a. Inflasi Berdasarkan Sifatnya

Berdasarkan sifatnya, inflasi dibagi menjadi empat kategori utama, yaitu:

1. Inflasi Rendah (*Creeping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya kurang dari 10% per tahun. Inflasi ini dibutuhkan dalam ekonomi karena akan mendorong produsen untuk memproduksi lebih banyak barang dan jasa.
2. Inflasi Menengah (*Galloping Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 10-30% per tahun. Inflasi ini biasanya ditandai oleh naiknya harga-harga secara cepat dan relatif besar. Angka inflasi pada kondisi ini biasanya disebut inflasi 2 digit, misalnya 15%, 20%, dan 30%.
3. Inflasi Berat (*High Inflation*), yaitu inflasi yang besarnya antara 30- 100% per tahun.
4. Inflasi Sangat Tinggi (*Hyperinflation*), yaitu inflasi yang ditandai oleh naiknya harga secara drastis hingga mencapai 4 digit (diatas 100%). Pada kondisi ini, masyarakat tidak ingin lagi menyimpan uang, karena nilainya turun sangat tajam sehingga lebih baik ditukarkan dengan barang.

b. Inflasi Berdasarkan Sebabnya

1. *Demand pull Inflation*. Inflasi ini terjadi disebabkan oleh permintaan masyarakat akan barang – barang (*Agregate Demand*) yang bertambah. Inflasi ini biasanya terjadi pada masa perekonomian yang berkembang dengan pesat. Kesempatan kerja yang tinggi menciptakan tingkat pendapatan yang tinggi pula yang kemudian menimbulkan pengeluaran yang melebihi dari kemampuan ekonomi untuk mengeluarkan barang dan jasa. Pengeluaran yang berlebihan ini akan menimbulkan inflasi. Selain pada masa perekonomian berkembang pesat,

Demand–pull Inflation juga dapat berlaku pada masa perang atau ketidakstabilan politik yang terjadi secara terus menerus. Dalam masa seperti ini pemerintah akan berbelanja jauh melebihi pajak yang dipungutnya. Untuk membiayai kelebihan pengeluaran tersebut pemerintah terpaksa mencetak uang atau meminjam dari bank sentral. Pengeluaran pemerintah yang berlebihan tersebut menyebabkan permintaan agregat akan melebihi kemampuan ekonomi tersebut menyediakan barang dan jasa. Maka keadaan ini akan mewujudkan inflasi.

2. *Cost push inflation*. Inflasi ini terjadi karena kenaikan biaya produksi, yang disebabkan oleh terdepresiasinya nilai tukar, dampak inflasi luar negeri terutama negara- negara partner dagang, peningkatan harga – harga komoditi yang diatur pemerintah (*Administered Price*), dan terjadi negative supply shocks akibat bencana alam dan terganggunya distribusi. Inflasi ini terutama berlaku dalam masa perekonomian berkembang pesat ketika tingkat pengangguran sangat rendah. Apabila perusahaan – perusahaan masih menghadapi permintaan yang bertambah, mereka akan berusaha menaikkan produksi dengan cara memberikan gaji atau upah yang lebih tinggi kepada pekerjanya dan mencari pekerja baru dengan tawaran pembayaran yang lebih tinggi ini. Langkah ini mengakibatkan biaya produksi meningkat, yang akhirnya akan menyebabkan kenaikan harga – harga berbagai barang.²⁹
3. *Bottle Neck Inflation*. Inflasi ini dipicu oleh faktor penawaran (*Supply*) atau faktor permintaan (*Demand*). Jika dikarenakan faktor penawaran maka

²⁹Siti Rahmiana, “Analisis Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Konsumsi Daerah, Investasi Daerah Dan Suku Bunga Kredit Investasi Daerah Terhadap Inflasi Di Provinsi Lampung”, Skripsi, Lampung, 2016, Hlm. 50

persoalannya adalah sekalipun kapasitas yang ada sudah terpakai tetapi permintaannya masih banyak sehingga menimbulkan inflasi. Adapun inflasi kerena faktor permintaan disebabkan adanya likuiditas yang lebih banyak, baik itu berasal dari sisi keuangan (*Monetary*) atau akibat tingginya ekspektasi terhadap permintaan baru.³⁰

c. Inflasi Berdasarkan Asalnya

1. Inflasi yang berasal dari dalam negeri (*Domestic Inflation*). Inflasi ini timbul karena terjadinya defisit dalam pembiayaan dan belanja negara yang terlihat pada anggaran belanja negara. Untuk mengatasinya, biasanya pemerintah melakukan kebijakan mencetak uang baru.
2. Inflasi yang berasal dari luar negeri (*Imported Inflation*). Inflasi ini timbul karena negara-negara yang menjadi mitra dagang suatu negara mengalami inflasi yang tinggi. Kenaikan harga-harga di luar negeri atau di negara-negara mitra dagang utama (antara lain disebabkan melemahnya nilai tukar) yang secara langsung maupun tidak langsung akan menimbulkan kenaikan biaya produksi biasanya akan disertai dengan kenaikan harga-harga barang.³¹

2.1.3 Teori Inflasi

Setelah memahami apa yang disebut sebagai inflasi, pada bagian ini akan dibahas tentang teori dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya inflasi. Secara garis besar ada tiga kelompok teori mengenai inflasi yaitu:³²

³⁰ Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, "*Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*", (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007), Hlm. 113.

³¹ *Ibid*, Hlm. 113-114

³² Suseno, Siti Astiyah, "*Inflasi*", (Jakarta : Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009), Hlm. 7-10

1. Teori Kuantitas

Teori kuantitas pada dasarnya merupakan suatu hipotesis tentang faktor yang menyebabkan perubahan tingkat harga ketika kenaikan jumlah uang beredar merupakan faktor penentu atau faktor yang mempengaruhi kenaikan tingkat harga. Teori kuantitas tidak hanya menyatakan bahwa jumlah uang beredar sebagai faktor penyebab perubahan tingkat harga.

Teori kuantitas uang juga terkait dengan teori tentang:

- (1) Proporsionalitas jumlah uang dengan tingkat harga.
- (2) Mekanisme transmisi moneter.
- (3) Netralitas uang, dan
- (4) Teori moneter tentang tingkat harga.

Ahli ekonomi moneter yang menganut teori kuantitas dalam perkembangannya lebih dikenal dengan ahli ekonomi yang beraliran Monetaris. Salah satu tokoh aliran monetaris ini adalah Milton Friedman adalah ekonom yang menyempurnakan teori kuantitas dan memformulasikan lebih lanjut teori kuantitas uang serta menyusun teori tentang permintaan uang. Teori permintaan uang tersebut dalam perkembangannya menjadi teori yang sangat penting dalam teori makroekonomi. Teori permintaan uang dalam perkembangannya juga telah mengalami banyak variasi serta perkembangan yang sangat pesat.

Teori permintaan uang pada dasarnya menyatakan bahwa permintaan uang masyarakat ditentukan oleh sejumlah variabel ekonomi yang antara lain pertumbuhan ekonomi, suku bunga, dan tingkat harga. Sejalan dengan teori permintaan uang, tingkat harga atau laju inflasi hanya akan berubah apabila

jumlah uang beredar tidak sesuai dengan jumlah yang diminta atau di perlukan oleh suatu perekonomian. Apabila jumlah uang yang beredar lebih besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diminta atau dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan meningkat dan terjadilah inflasi. Sebaliknya, apabila jumlah uang yang beredar lebih kecil dengan jumlah uang yang dibutuhkan oleh masyarakat, maka tingkat harga akan turunan terjadi apa yang disebut sebagai deflasi.

2. Teori Keynes

Pendekatan Keynes juga menyatakan bahwa teori kuantitas yang mengasumsikan elastisitas dan perputaran uang (*Velocity Of Circulation*) adalah tetap juga tidak benar. Elastisitas dan perputaran uang sangat sulit diprediksi dan banyak dipengaruhi oleh ekspektasi masyarakat serta perubahan barang-barang yang merupakan substitusi uang (*Financial Assets*). Hal tersebut terbukti bahwa dalam suatu perekonomian yang sektor keuangannya telah maju dan terdapat instrumen-instrumen keuangan yang berfungsi sebagai substitusi uang, maka perputaran uang akan menjadi semakin sulit diprediksi.

Dalam perkembangannya perbedaan pendapat antara ekonom aliran moneteris, aliran Keynesian, dan yang lain semakin kecil, atau terjadi konvergensi antara berbagai aliran tersebut. Mishkin menyatakan bahwa sepanjang inflasi dilihat sebagai *Sustained Inflation* atau inflasi yang terus menerus dan berjangka panjang, maka baik ekonom aliran moneteris maupun ekonom aliran Keynesian sependapat bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter. Untuk membuktikan bahwa inflasi adalah suatu gejala moneter, berbagai kajian yang dipelopori oleh

Friedman dan dilanjutkan oleh berbagai kajian selanjutnya, telah dapat menguji bahwa dalam jangka panjang memang terdapat keterkaitan yang erat antara inflasi dan jumlah uang yang beredar. Dalam pengertian umum dapat dikatakan bahwa inflasi terutama timbul karena jumlah uang yang beredar dalam suatu perekonomian melebihi jumlah uang beredar yang diminta atau diperlukan oleh perekonomian bersangkutan. Pengertian tersebut tidak mengatakan bahwa tidak terdapat faktor-faktor lain yang dapat menimbulkan laju inflasi. Banyak faktor lain yang dapat menjadi penyebab timbulnya inflasi, tetapi inflasi terutama disebabkan oleh jumlah uang beredar atau likuiditas yang berlebihan.

3. Teori Strukturalis³³

Teori strukturalis mengenai inflasi didasarkan pada pengalaman di negara-negara Amerika Latin. Teori ini memberi tekanan pada ketegaran (*Inflexibilities*) dari struktur perekonomian negara-negara sedang berkembang.

Karena inflasi dikaitkan dengan faktor-faktor struktural, maka menurut teori ini terdapat 2 (dua) ketegaran utama dalam perekonomian negara sedang berkembang yang dapat menimbulkan inflasi, yaitu:

- 1) Dibandingkan dengan sektor lainnya.
- 2) Produksi bahan makanan dalam negeri.

Pertumbuhan produksi bahan makanan dalam negeri tidak mampu mengimbangi pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan pendapatan perkapita. Akibatnya, harga bahan makanan dalam negeri cenderung naik terus melebihi

³³Agus Budi Santosa, "Analisis Inflasi Di Indonesia", Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017. Hlm. 447

kenaikan barang bukan makanan. Kondisi tersebut akan mempengaruhi sisi demand (permintaan), dalam artian bahwa ongkos produksi, yang berarti pula mengakibatkan kenaikan harga barang. Proses tersebut akan berlangsung terus dan akan berhenti dengan sendirinya seandainya harga bahan makanan tidak naik.

2.1.4 Perhitungan Inflasi

Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga. Beberapa indeks harga yang sering digunakan untuk mengukur inflasi antara lain:³⁴

1. *Producer Price Index* (PPI)/Indeks Harga Produsen (IHP) *Producer Price Index* atau Indeks Harga Produsen (IHP) mengukur perubahan harga yang diterima produsen domestik untuk barang yang mereka hasilkan. IHP mengukur tingkat harga yang terjadi pada tingkat produsen.
2. *Wholesale Price Index*/Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) Indeks Harga Perdagangan Besar mengukur perubahan harga untuk transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dan pembeli/ pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama. Di beberapa negara termasuk Indonesia, IHPB merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga dari komoditas-komoditas yang diperdagangkan di suatu daerah.
3. *Consumer Price Index* (CPI)/Indeks Harga Konsumen (IHK) *Consumer Price Index* adalah indeks yang yang paling banyak digunakan dalam penghitungan inflasi. Indeks ini disusun dari harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh

³⁴ G.A. Diah Utari, Retni Cristina S, Sudiro Pambudi, “*Inflasi Di Indonesia : Karakteristik Dan Pengendaliannya*”, (Jakarta : BI Institute, 2016), Hlm. 5

masyarakat. Jumlah barang dan jasa yang digunakan dalam penghitungan angka indeks tersebut berbeda antar negara dan antar waktu, bergantung pada pola konsumsi masyarakat akan barang dan jasa tersebut. Sebagai contoh, di Indonesia pada awalnya hanya digunakan sembilan bahan pokok (meliputi pangan, sandang, dan perumahan) yang dikonsumsi masyarakat. Dalam perkembangannya, jumlah barang dan jasa tersebut berkembang menjadi semakin banyak dan tidak hanya meliputi pangan, sandang, dan papan, tetapi juga mencakup, antara lain, jasa kesehatan dan pendidikan.

2.1.5 Indikator Inflasi

Adapun indikator inflasi terdapat menjadi dua yang dapat dijadikan alat ukur perubahan tingkat harga, yaitu:³⁵

1. *PDB Deflator (Produk Domestik Bruto Deflator)* mengukur perubahan harga dalam perekonomian secara keseluruhan. Cakupan perubahan harga yang diukur dalam *PDB Deflator* lebih luas dibandingkan dengan IHK dan IHPB. Angka *Deflator* tersebut dihitung dengan membandingkan PDB nominal pada suatu tahun tertentu dengan PDB pada tahun tertentu yang ditetapkan. *Deflator* PDB menunjukkan besarnya perubahan harga dari semua barang baru, barang produksi lokal, barang jadi dan jasa.
2. Indeks Harga Aset (HA) Perilaku pergerakan harga aset, baik aset berupa properti dan saham, dapat dijadikan indikator adanya tekanan terhadap harga secara keseluruhan. Dalam hal ini, indeks harga aset (IHA) mencerminkan potensi tekanan permintaan ke depan melalui jalur *Wealth Effect*.

³⁵*Ibid*, Hlm. 6

2.1.6 Dampak Inflasi

Dampak inflasi terhadap suatu perekonomian diantaranya sebagai berikut:³⁶

1. Nilai suatu mata uang akan mengalami penurunan dan daya beli mata uang tersebut menjadi semakin rendah. Penurunan daya beli mata uang selanjutnya akan berdampak pada individu, dunia usaha dan APBN. Dengan kata lain, laju inflasi yang tinggi dapat berdampak buruk terhadap perekonomian secara keseluruhan.
2. Inflasi mendorong redistribusi pendapatan diantara anggota masyarakat, hal inilah yang disebut dengan efek redistribusi dari inflasi. Inflasi akan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi anggota masyarakat, sebab redistribusi pendapatan yang terjadi akibat inflasi akan mengakibatkan pendapatan riil satu orang meningkat, tetapi pendapatan riil yang lain akan jatuh. Umumnya bagi mereka yang berpendapatan tetap seperti pegawai negeri akan mengalami dampak negatif inflasi, hal tersebut dikarenakan inflasi yang tinggi pendapatan riil mereka akan turun.
3. Inflasi menyebabkan perubahan-perubahan dalam output dan kesempatan kerja. Hal tersebut terjadi dikarenakan inflasi memotivasi perusahaan untuk memproduksi lebih atau kurang dari yang telah dilakukan selama ini.
4. Inflasi menyebabkan sebuah lingkungan yang tidak stabil bagi kondisi ekonomi. Jika konsumen memperkirakan tingkat inflasi di masa mendatang akan naik, maka akan mendorong mereka untuk melakukan pembelian barang-

³⁶Herlan Firmansyah, Dkk., “*Advanced Learning Economics 2 For Grade XI Social Sciences Programme*”, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014), Hal. 149-150.

barang dan jasa secara besar-besaran pada saat sekarang dari pada mereka menunggu tingkat harga sudah meningkat lagi.

5. Inflasi cenderung memperendah tingkat bunga riil dan menyebabkan terjadinya ketidak seimbang di pasar modal. Hal tersebut menyebabkan penawaran dana untuk investasi menurun, dan sebagai akibatnya, investor sektor swasta berkurang sampai ke bawah tingkat keseimbangannya.

2.2 Instrumen Moneter Syariah

Instrumen moneter syariah adalah hukum syariah. Hampir semua instrumen moneter pelaksanaan kebijakan moneter konvensional maupun surat berharga yang menjadi underlying-nya mengandung unsur bunga. Oleh karena itu, instrumen-instrumen konvensional yang mengandung unsur bunga (*Bank Rates, Discount Rate, Open Market Operation* dengan sekuritas bunga yang ditetapkan didepan) tidak dapat digunakan pada pelaksanaan kebijakan moneter berbasis Islam. Tetapi sejumlah instrumen kebijakan moneter konvensional menurut sejumlah pakar ekonomi Islam masih dapat digunakan untuk mengontrol uang dan kredit, seperti *Reserve Requirement, Overall And Selectign Credit Ceiling, Moral Suasion And Change In Monetary Base*. Operasi pasar terbuka dapat juga dikendalikan melalui bentuk sekuritas berdasarkan ekuitas (*Equity Based Type Of Securities*).³⁷

³⁷ Andri Soemitra, "Bank dan Lembaga Keuangan Syariah", (Depok : Kencana, 2017), hlm. 12- 13.

Adapun menurut Muhammad, secara mendasar terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :³⁸

1.) *Regulation Of The High-Powered Money*

Pasokan uang bertenaga tinggi harus konsisten dengan pertumbuhan di sektor riil perekonomian untuk mendukung proses pertumbuhan dan menghindari inflasi tinggi (karena kelebihan pasokan uang). Bank sentral, sebagai agen kebijakan moneter pemerintah, akan menentukan ukuran pertumbuhan yang optimum di uang bertenaga tinggi dan menentukan pemerintah bebas biaya dan lembaga keuangan lainnya dengan prinsip mudharabah.

2.) *Statutory Reserve Requirement Ratio*

Ini merupakan persyaratan dari bank-bank komersial untuk menjaga proporsional deposito sebagai cadangan wajib dengan bank sentral. Rasio cadangan dapat meningkat atau menurun sesuai dengan perintah kebijakan moneter. Ini rasio cadangan tertentu persentase Bank Deposit yang harus dimiliki oleh bank sentral, misalnya 5%. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat meningkatkan PR misalnya dari 5% menjadi 20%, dampak dari uang di bank-bank komersial akan kurang, jadi sebaliknya.

3.) *Moral Suassion*

Instrumen kebijakan moral ini diharapkan akan lebih efektif dalam sistem perbankan syariah yang dimuat nilai daripada rekan-rekan konvensional. Persuasi moral, saran dan konsultasi saling akan memainkan peran penting dalam kebijakan keputusan dari bank-bank komersial sehubungan dengan

³⁸ Muhammad, "*Kebijakan Fiskal dan Moneter Dalam Ekonomi Islam*", (Jakarta: Salemba Empat, 2002), h.67.

ukuran, alam, dan arah mereka pinjaman, murabahah dan pembiayaan ekuitas.

4.) *Lending Ratio*

Ini merujuk kepada persentase permintaan deposito yang bank komersial akan diperlukan untuk meminjamkan kepada target kelompok gratis (qardh hasanah) dibawah sistem perbankan syariah. Tingginya rasio pinjaman akan mengurangi kredit penciptaan dasar bank-bank komersial dan sebaliknya.

5.) *Refinance Ratio*

Refinance adalah proporsi pinjaman bebas bunga. Rasio ini dapat bekerja sebagai dasar sumber daya fungsi bank sentral Islam. Ini melibatkan penyediaan likuiditas untuk bank-bank komersial pada saat dibutuhkan oleh mereka secara gratis. Dasar *Refinance* tersebut mungkin juga termasuk jumlah yang dialihkan kepada pemerintah dari persyaratan permintaan deposito rasio. Ketika rasio meningkat, diberikan *Refinance* meningkat, dan kapan *Refinance Ratio* turun, bank- bank komersial harus berhati-hati karena mereka dipaksa untuk membuat pinjaman.

6.) *Profit Sharing Ratio*

Rasio laba adalah rasio yang digunakan untuk mendistribusikan keuntungan antara bank dan pengusaha. Berbagi keuntungan tinggi dari pengusaha akan mendorong lebih banyak investasi dan sebaliknya. Bank Sentral dapat menggunakan rasio laba sebagai instrumen moneter untuk mengatur muka bank. Dimana, ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk pelanggan akan meningkat.

7.) *Demand Deposit Ratio*

Ini adalah persentase permintaan deposito dialihkan kepada pemerintah untuk pembiayaan proyek sosial bermanfaat dimana pembiayaan komersial tidak diinginkan dari layak. Variasi dalam rasio ini diharapkan untuk mempengaruhi berhubung dengan putaran fluktuasi dalam perekonomian dengan mengubah dasar kredit bank komersial dan pengeluaran kemampuan pemerintah.

8.) *Credit Rationing*

Bank sentral dapat mengontrol arah dan ukuran pinjaman dan berdasarkan ekuitas maju ke sektor-sektor tertentu ekonomi yang melayani fungsi ganda pengendalian kredit selektif serta umum.

9.) *Government Investment Certificate*

Dalam ketiadaan berbasis bunga obligasi dan sekuritas, operasi pasar terbuka dapat dilakukan oleh penjualan dan pembelian beberapa berdasarkan ekuitas saham sebagai catatan kebijakan moneter. Ini *Treasury Bills* dapat tidak diterima dalam ekonomi Islam, kemudian sebagai penggantinya pemerintah menerbitkan dengan sistem bebas bunga, disebut GIC: *Government Investment Certificate*.

Salah satu keberhasilan pencapaian tujuan dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia dibidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter

berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk mempengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah.³⁹

2.3. Instrumen Pengendalian Moneter Syariah

1. Mazhab Pertama (*Iqtishaduna*)⁴⁰

Pada masa awal Islam dapat dikatakan bahwa tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran uang melalui kebijakan diskresioner. Selain itu, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang, karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang saja serta peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrumen negosiasi (*negotiable instruments*) dirancang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan sistem kredit tersebut menciptakan uang.

Promissory Notes atau *Bill of Exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa ataupun untuk mendapatkan sejumlah dana segar, namun surat tersebut tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Kreditor dapat menjual surat tersebut akan tetapi debitur tidak dapat menjual uang ataupun komoditi sebelum ia menerima surat tersebut. Karena itulah tidak ada pasar untuk jual beli negotiable instruments, spekulasi dan penggunaan pasar uang menjadi tidak ada. Jadi sistem kredit tidak menciptakan uang. Aturan-aturan tersebut memenuhi keseimbangan antara pasar dan pasar uang

³⁹ Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Depok : Kencana, 2017), h.211.

⁴⁰ Adiwarmanto karim, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Kedua,2017) h.56

berdasarkan transaksi tunai. Dalam *nasi'a* atau aturan transaksi Islam lainnya, pada saat komoditi dibeli saat ini sedangkan pembayarannya dilakukan kemudian, uang yang dibayarkan atau diterima untuk mendapatkan komoditas atau jasa⁴¹. Dengan kata lain, uang dipertukarkan dengan sesuatu yang benar-benar memberikan nilai tambah nilai tambah bagi perekonomian. Transaksi lainnya seperti judi, riba, jual-beli *superficial promissory notes* dilarang dalam Islam sehingga keseimbangan antara arus uang dan barang atau jasa dapat dipertahankan. Jika diperhatikan dengan seksama, maka tampak bahwa perputaran uang dalam periode tertentu sama dengan nilai barang dan jasa yang diperlukan pada rentang waktu yang sama.

Instrumen lain yang digunakan pada saat ini untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek yaitu *Open Market Operation* (melalui jual beli surat berharga pemerintah) jelas belum ada pada masa awal perkembangan Islam. Selain itu, jelas tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga tersebut bertentangan dengan ajaran Islam karena adanya larangan yang berkenaan dengan riba dalam Islam itu sendiri.

2. Mazhab Kedua (*Mainstream*)⁴²

Tujuan kebijakan moneter yang diberlakukan oleh pemerintah adalah maksimalkan sumber daya (*resources*) yang ada agar dapat dialokasikan pada kegiatan perekonomian yang produktif. Di dalam Al Qur'an sudah jelas bahwa kita dilarang untuk melakukan penumpukan uang (*money hoarding*) yang pada

⁴¹ *Ibid.*, h. 59

⁴² *Ibid.*, h.85

akhirnya akan menjadikan uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kekayaan yang *idle* tersebut akan menjadikan sumber dana yang pada awalnya bersifat produktif menjadi tidak produktif. Oleh sebab itu, mazhab kedua ini merancang sebuah instrumen kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan uang agar dapat dialokasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif, yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*) semakin banyak uang yang *idle*, maka berarti permintaan uang untuk berjaga-jaga semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang *idle* berbaring terbalik dengan permintaan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of idle fund* adalah instrument kebijakan uang dikenakan pada semua aset produktif uang *idle*.

Apabila permintaan uang ditujukan untuk berjaga-jaga meningkatkan, maka usaha yang dilakukan pemerintah untuk mengembalikan permintaan uang pada titik keseimbangan (*equilibrium*) adalah dengan cara meningkatkan *dues of idle fund*. Semakin tinggi *dues of fund* yang dikenakan terhadap uang yang *idle* akan menyebabkan masyarakat enggan untuk tetap menyimpan uang yang *idle* tersebut. Konsekuensinya masyarakat yang mempunyai uang *idle* akan secara sukarela mengalokasikan kekayaannya pada investasi yang sifatnya produktif.

Instrumen *dues of idle fund* juga dapat digunakan untuk memenuhi

permintaan agregatif (AD). Kebijakan yang ditujukan untuk meningkatkan permintaan Agregatif (AD) atau untuk mendorong laju pertumbuhan pendapatan nasional dapat dilakukan dengan cara meningkatkan *dues of iddle fund*.

Peningkatan *dues of idle fund* akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang/aset yang produktif kepada tujuan penggunaan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor riil, sehingga investasi akan meningkat. Peningkatan investasi tertentu saja akan berdampak pada peningkatan permintaan Agregatif (AD), sehingga keseimbangan umum yang baru akan beredar pada tingkat pendapatan nasional yang lebih tinggi.

3. Mazhab Ketiga (Alternatif)⁴³

Mazhab ketiga ini sangat banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran ilmiah dari Dr.M.A Choudhury. Sistem yang kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah *syuratiq process* yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter adalah berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektor riil. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang kemudian dituangkan dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmionisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektor riil.

Sementara itu, Umer Chapra mengemukakan instrumen- Instrumen pengendalian moneter perkonomian Islam, terdiri dari:⁴⁴

⁴³ *Ibid.*,h. 95

⁴⁴ Umer chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press,2010), h.96

- a. Target Pertumbuhan dalam M dan M_0 .
- b. Saham Publik terhadap Deposito Unjuk (Uang Giral).
- c. Cadangan Wajib Resmi/GWM .
- d. Alokasi Kredit yang Berorientasi kepada Nilai.
- e. Pembatas Kredit.

A. Penerapan Instrumen Moneter Syariah di Beberapa Negara

Sementara itu, penerapan instrumen- instrumen pengendalian moneter syariah berbeda pada masing-masing negara. Termasuk juga pada negara yang muslim, maupun negara dengan sistem moneter ganda.

Pada masa sebelum diberlakukannya syariat Islam pada sistem perbankan di Sudan, Bank Sentral Sudan (BOS) sangat tergantung pada instrumen- instrumen langsung seperti tingkat suku bunga, plafon kredit (*credit ceiling*), ketentuan rasio likuiditas (*statutara liquidity ratio*), dan tingkat diskonto. Pada awalnya instrumen-instrumen tersebut sangat efektif karena perekonomian Sudan yang mempunyai karakteristik yaitu sistem finansial yang non-kompretitif, pasar model primer dan sekunder yang belum berkembang, serta kelangkaan modal. Namun karena instrumen-instrumen langsung tersebut mengakibatkan distorsi dari lokasi sumber daya bank, interferensi terhadap mekanisme harga, pembatasan kredit, serta mislokasi dan distorsi dari kompetisi akibat penerapan batasan- batasan pada manajemen aset bank. Pada akhirnya, BOS lebih memilih untuk memakai instrumen-instrumen tidak langsung seperti RR dan OMO.

Pada tahun 1984, setelah diperkenalkannya syariah Islam di Sudan, BOS mengeluarkan arahan dan perintah kepada seluruh bank yang beroperasi di Sudan agar menjalankan prinsip-prinsip perbankan yang sesuai dengan syariat Islam dalam aktivitas kesehariannya.⁴⁵

Akibatnya, BOS dihadapkan pada permasalahan substitusi instrumen moneter konvensional dengan instrumen moneter yang sesuai dengan syariat Islam untuk dapat mempertahankan perannya sebagai pengawas dan pemberi arahan bagi bank- bank, melakukan ekspansi atau kontraksi penawaran uang atau kredit, dan meimplementasikan kebijakan moneter, serta sekaligus menjaga kepentingan publik.

Instrumen moneter syariah yang digunakan oleh Sudan dalam operasional bank sentralnya adalah sebagai berikut:⁴⁶

1. *Central Bank Musharaka Certificates (CMCs)*
2. *Government Musharaka Certificates (GMCs)*
3. *Government Investment Certificates (GICs)*
4. *Foreign Exchange*

Selain itu, dijelaskan pula instrumen moneter syariah yang digunakan oleh negara dengan sistem moneter ganda yaitu Pakistan dan Malaysia dalam operasional bank sentralnya, sebagai berikut:⁴⁷

1. *Mudharaba Certificate*

⁴⁵ Ascarya, *Seri Kebanksentralan: Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*,(Jakarta: Bank Indonesia,2012) h.128

⁴⁶ Ascarya, *Seri Kebanksentralan: Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*,(Jakarta: Bank Indonesia,2012) h.130

⁴⁷ *Ibid.*,h. 135

2. *Participation Term Certificate (PTCs)*
3. *Certificate of Musharika (COMs)*
4. *Term Finance Certificate (TFCs)*

Di Malaysia, penggunaan *ba'I al 'inah* (jual beli dengan janji akan membelinya kembali) diperbolehkan. Penggunaan akad *ba'i al inah* mendorong semakin banyaknya instrumen yang digunakan. Yaitu sebagai berikut:⁴⁸

1. *Government Investment Issues-i*
2. *Malaysian Islamic Treasury Bills*
3. *Bank Negara Negotiable Notes-i*
4. *Cagamas Papers*
5. *Commercial Papers-i*
6. *Negotiable Debt Certificate-i*
7. *Negotiable Instrumen of Deposits-i*
8. *Sell and Buy Back Agreements (Repo-i)*
9. *Foreign Exchange*
10. *Promissory FX Contract-i*

Untuk mencapai sasaran akhir yang diinginkan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, BI sebagai otoritas moneter selanjutnya melakukan

⁴⁸ *Ibid.*, h. 142

perencanaan dan penyusunan program kebijakan pengendalian uang beredar, baik kebijakan moneter yang mengarah pada kebijakan pengetatan atau kontraksi moneter maupun kebijakan ekspansi. Pelaksanaan kebijakan pengendalian jumlah uang beredar tersebut sangat tergantung pada kondisi uang beredar dan arah kebijakan moneter BI

B. Instrumen Pengendalian Moneter Syariah Di Indonesia

Untuk mempengaruhi jumlah uang beredar, BI menggunakan beberapa Instrumen pengendalian moneter baik langsung maupun tidak langsung.

a. Instrumen pengendalian moneter langsung

- Penurunan nilai uang
- Kredit langsung

b. Instrumen pengendalian moneter tidak langsung

- Giro Wajib Minimum
- Fasilitas Diskonto (Tingkat Suku Bunga)
- Operasi Pasar Terbuka (OPT) Meliputi tindakan menjual dan membeli surat-surat berharga oleh bank sentral. Berikut beberapa instrumen yang digunakan dalam Operasi Pasar Terbuka di Indonesia, yaitu:⁴⁹
 - Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
 - Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
 - Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)

⁴⁹ Muhammad , *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (. Jakarta: Salemba Empat,2012)h.130

- *Reverse Repo* – Sertifikat Bank Syariah Negara (RR-SBSN)
- Sertifikat Deposito
- *Commercial Paper*
- *Call Money*
- Wesel dan Promes
- *Repurchase Agreement*
- *Bill of Exchange*
- *Banker's acceptance*
- Fasilitas Simpanan Bank Indonesia (FASBI)
- Imbauan Moral

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia, menjadi keunggulan tersendiri bagi sistem perekonomian Indonesia. Sebagai otoritas moneter tertinggi BI telah menetapkan beberapa Instrumen pengendalian moneter syariah yang mengontrol keberlangsungan industri perbankan syariah. Beberapa instrumen yang ditetapkan merupakan instrumen yang memiliki fungsi sama seperti pada sistem perbankan konvensional. Akan tetapi kebijakan-kebijakannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan syariah.

Berikut ini adalah pengertian instrumen-instrumen moneter syariah yang diterapkan di Indonesia:⁵⁰

1. SBIS Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS

⁵⁰ *Ibid.*, h.140

adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang Rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Reverse Repo Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat RR-SBSN, atau dapat disebut Sukuk Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN dalam mata uang Rupiah.

2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat FASBIS adalah fasilitas yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada bank umum syariah, unit usaha syariah pialang pasar uang rupiah dan valas untuk menempatkan dananya di Bank Indonesia dalam bentuk Rupiah.
3. Adapun Giro Wajib Minimum (GWM) pada bank syariah ditetapkan sesuai dengan ketentuan BI dan Imbauan Moral (*Moral Suassion*) untuk perbankan syariah kurang lebih memiliki pengertian yang sama dengan yang dilakukan BI terhadap perbankan konvensional.
4. PUAS atau Pasar Uang Antar Bank Syariah adalah kegiatan pinjam meminjam dana antara satu bank yang memiliki kelebihan likuiditas dengan bank lainnya yang membutuhkan likuiditas. Transaksi PUAS dapat berjangka waktu dari satu hari kerja (*overnight*) sampai dengan satu tahun.

2.2.1 Pengertian Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Keberadaan SBI sebagai instrumen kebijakan moneter memiliki tingkat keberhasilan yang signifikan. Akan tetapi SBI dengan sistem diskontonya tentu saja membuat bank syariah tidak dapat ikut serta dalam upaya pengendalian jumlah uang beredar tersebut. Untuk itu, kemudian Bank Indonesia menyiapkan

instrumen lain berupa Sertifikat Wadiah Bank Indonesia. Akan tetapi, karakteristik dasarnya yang berprinsip wadiah rupanya kurang efektif. Maka dari itu, untuk meningkatkan efektifitas pengendalian moneter, maka Bank Indonesia menyiapkan sebuah instrumen yang bernama Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁵¹

Sebelumnya SBIS dikenal dengan Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia Syariah (SWBI) yang merupakan instrumen kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengatasi kesulitan kelebihan likuiditas pada bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Fatwa DSN-MUI mengenai wadi'ah yang telah dikeluarkan adalah Fatwa DSN-MUI No. 36/DSN-MUI/X/2002 tentang Sertifikat Wadi'ah Bank Indonesia (SWBI) dan Fatwa DSN-MUI No. 63/DSN-MUI/XII/2007 tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS).⁵²

SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. SBIS diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah. Sebagai instrumen pengendalian moneter SBIS boleh diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan operasi pasar terbuka (OPT). Bank Indonesia memberikan imbalan kepada pemegang SBIS sesuai dengan akad yang dipergunakan. Bank Indonesia wajib mengembalikan dana SBIS kepada pemegangnya pada saat jatuh

⁵¹Dimas Prabowo, *"Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Jumlah Uang Beredar (Jub) Terhadap Indeks Syariah Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi)"*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, Hlm. 23

⁵²Nursantri Yanti, *"Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah"*, Dalam Jurnal At-Tawassuth, Vol.III, No. 1, 2018, Hlm. 589

tempo. Bank syariah boleh memanfaatkan dananya yang belum digunakan kepada sektor riil.⁵³

oleh karena itu Bank Indonesia yg memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bahwa dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah (PBI No. 10/11/PBI/ 2008).⁵⁴

Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disebut SBIS adalah surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia (PBI No. 10/11/PBI/2008). SBIS ini yang akan menjadi alternatif bagi bank syariah untuk mengamankan dananya. Karena apabila terjadi inflasi maka masyarakat akan lebih menyukai menyimpan uangnya dibandingkan mengambil pembiayaan di bank syariah.⁵⁵

2.2.2 Karakteristik SBIS

Karakteristik sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) saat ini adalah:⁵⁶

⁵³ *Ibid*, hlm. 589

⁵⁴Rahmad Dahlan, "Pengaruh Tingkat Bonus Sbis Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia", Dalam Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015. Hlm. 64

⁵⁵ *Ibid*, Hlm. 65

⁵⁶ Dimas Prabowo, "*Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Jumlah Uang Beredar (Jub) Terhadap Indeks Syariah Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi)*", Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013, Hlm. 23-25

1. Menggunakan akad ju'alah namun, berdasarkan fatwa DSN-MUI, SBI Syariah juga dapat diterbitkan dengan menggunakan akad mudharabah, musyarakah, wadiah, qardh, dan wakalah).
2. Bersatuan unit sebesar Rp1 juta
3. Berjangka waktu paling kurang satu bulan dan paling lama 12 bulan;
4. Diterbitkan tanpa warkat (*Scriptless*)
5. Dapat diagunkan kepada BankIndonesia, dan
6. Tidak dapat diperdagangkan di pasar sekunder (*Non-Negotiable*).

Seperti halnya SBI, SBIS adalah juga instrumen Bank Indonesia untuk operasi pasar terbuka, utamanya melalui mekanisme perbankan syariah. Mekanisme penerbitan SBIS adalah lewat cara lelang. Pihak yang dapat diikuti sertakan dalam proses pelelangan SBIS adalah sebagai berikut:

1. Bank Umum Syariah (BUS) atau Unit Usaha Syariah (UUS) atau pialang yang bertindak untuk dan atas nama BUS/UUS; dan
2. BUS atau UUS, baik sebagai peserta langsung maupun peserta tidak langsung, wajib memenuhi persyaratan *Financing To Deposit Ratio* (FDR) yang ditetapkan Bank Indonesia.

Bank Indonesia memberikan imbalan terhadap SBIS yang diterbitkan. Sedangkan hasil dari transaksi lelang SBIS dapat dibatalkandengan cara sebagai berikut:

1. Hasil lelang SBIS dapat dibatalkan oleh Bank Indonesia.
2. Transaksi SBIS (setelmen lelang SBIS, setelmen first leg Repo SBIS, dan setelmen second leg Repo SBIS) dinyatakan batal apabila saldo rekening giro

dan saldo rekening surat berharga BUS atau UUS di Bank Indonesia tidak mencukupi.

2.2.3. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah⁵⁷

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah.

Karakteristik Fasbis, sebagai berikut :

1. FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS.
2. FASBIS menggunakan akad wadiah (titipan).
3. FASBIS disediakan Bank Indonesia pada setiap hari kerja Bank Indonesia, termasuk pada hari kerja terbatas Bank Indonesia.
4. FASBIS dilakukan dengan mekanisme nonlelang.
5. Pengajuan transaksi FASBIS dilakukan melalui Sistem BI-ETP.
6. FASBIS tidak dapat diperdagangkan, tidak dapat diagunkan, dan tidak dapat dicairkan sebelum jatuh waktu.
7. Jangka waktu FASBIS paling lama 14 (empat belas) hari kalender dihitung dari tanggal penyelesaian transaksi sampai dengan tanggal jatuh waktu.
8. Jumlah hari dalam perhitungan imbalan FASBIS dihitung berdasarkan hari kalender.

⁵⁷ https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_174315.pdf

9. Window time transaksi FASBIS ditetapkan dari pukul 16.00 WIB sampai dengan pukul 17.30 WIB atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
10. Bank Indonesia mengumumkan transaksi FASBIS melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebelum window time FASBIS.
11. Bank Indonesia dapat memberikan imbalan atas penempatan dana Bank pada FASBIS.
12. Dalam hal Bank Indonesia memberikan imbalan FASBIS sebagaimana dimaksud dalam angka 11 maka pemberian imbalan dilaksanakan pada saat FASBIS jatuh waktu.
13. Dalam hal terdapat perubahan window time dan tingkat imbalan FASBIS, pengumuman dilakukan sebelum window time FASBIS.
14. Bank Indonesia dapat menutup window time FASBIS dan mengumumkan penutupan tersebut melalui Sistem BI-ETP dan/atau sarana lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penutupan window time tersebut (T-1).
15. Peserta transaksi FASBIS adalah Bank.
16. Persyaratan Bank yang dapat mengajukan transaksi FASBIS sebagai berikut:
 - a. berstatus aktif sebagai peserta Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan Sistem BI-RTGS
 - b. tidak sedang dikenakan sanksi penghentian sementara untuk mengikuti kegiatan OMS;
 - c. harus memiliki Rekening Giro di Bank Indonesia; dan

- d. harus memiliki Rekening Surat Berharga pada BI-SSSS.
17. Bank bertanggung jawab atas kebenaran data penawaran transaksi FASBIS yang disampaikan kepada Bank Indonesia.
18. Bank hanya dapat mengajukan penawaran transaksi FASBIS untuk kepentingan diri sendiri.
19. Bank dilarang membatalkan pengajuan FASBIS yang telah disampaikan kepada Bank Indonesia.
20. Bank wajib menyediakan dana di Rekening Giro Rupiah yang mencukupi untuk memenuhi kewajiban setelmen FASBIS.
21. Dalam hal setelah terjadinya FASBIS, tanggal jatuh waktu FASBIS ditetapkan sebagai hari libur oleh pemerintah, pelaksanaan setelmen FASBIS dilakukan pada hari kerja berikutnya tanpa memperhitungkan tambahan tingkat imbalan FASBIS atas tambahan jangka waktu FASBIS.
22. Bank Indonesia menatausahakan FASBIS di BI-SSSS.

2.3 Konsumsi

2.3.1 Pengertian Konsumsi

Konsumsi adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan secara langsung. Keputusan untuk konsumsi rumah tangga mempengaruhi keseluruhan perilaku perekonomian baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Keputusan konsumsi sangatlah penting untuk menganalisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan pentingnya dalam jangka pendek karena perannya dalam menentukan

permintaan *Agregat*. Konsumsi adalah dua pertiga dari GDP, sehingga fluktuasi pada konsumsi adalah hal yang penting dari booming dan resesi ekonomi.⁵⁸

Para ahli ekonomi yang hanya mempertunjukkan kemampuannya untuk memahami dan menjelaskan prinsip produksi maupun konsumsi, mereka dapat dianggap kompeten untuk mengembangkan hukum-hukum nilai dan distribusi atau hampir setiap cabang lain dari subyek tersebut. Lebih lanjut Mannan mengatakan semakin tinggi kita menaiki jenjang peradaban, semakin kita terkalahkan oleh kebutuhan fisiologik karena faktor-faktor psikologis. Cita rasa seni, keangkuhan, dorongan-dorongan untuk pamer semua faktor ini memainkan peran yang semakin dominan dalam menentukan bentuk lahiriah konkret dari kebutuhan-kebutuhan fisiologik kita. Dalam suatu masyarakat primitif, konsumsi sangat sederhana, karena kebutuhannya sangat sederhana. Tetapi peradaban moderen telah menghancurkan kesederhanaan manis akan kebutuhan-kebutuhan ini.⁵⁹

2.3.2 Fungsi Konsumsi

Fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara tingkat pengeluaran konsumsi dengan tingkat pendapatan. Fungsi konsumsi dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut:⁶⁰

$$C = a + bY$$

⁵⁸Siti Rahmiana, "*Analisis Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Konsumsi Daerah, Investasi Daerah Dan Suku Bunga Kredit Investasi Daerah Terhadap Inflasi Di Provinsi Lampung*", Skripsi, Lampung, 2016, Hlm. 27

⁵⁹Abdul Hamid, "*Teori Konsumsi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat*", Dalam Jurnal j-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 2018, Hlm. 207

⁶⁰Nurul Huda, "*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*", (Jakarta: Kencana, 2008), Hlm. 36

Dimana C adalah besarnya pengeluaran konsumsi rumah tangga, a adalah besarnya konsumsi yang tidak tergantung pada jumlah pendapatan atau konsumsi jika tidak ada pendapatan, b adalah hasrat marginal masyarakat untuk melakukan konsumsi, Y adalah pendapatan disposable (pendapatan yang siap dikonsumsi) $a > 0$ dan $0 < b < 1$.

2.3.3 Tujuan Konsumsi

Tujuan konsumsi dalam teori ekonomi konvensional adalah mencari kepuasan (*Utility*) tertinggi. Penentuan barang atau jasa untuk dikonsumsi didasarkan pada kriteria tingkat kepuasan tersebut. Tingkat konsumsi seorang konsumen hanya ditentukan oleh kemampuan anggarannya. Selagi tersedia anggaran untuk membeli barang atau jasa tersebut, maka ia akan mengonsumsi barang atau jasa dimaksud. Semakin tinggi pendapatan seorang konsumen maka barang yang semula dianggap barang mewah akan berubah menjadi barang normal atau barang inferior. Dengan demikian konsumen itu tidak pernah berhenti mengonsumsi.⁶¹

2.3.4 Teori Konsumsi⁶²

Teori model pendapatan permanen PIH yang dikemukakan oleh Milton Friedman. Menurut teori ini, pendapatan masyarakat dapat digolongkan menjadi dua, yaitu pendapatan permanen (*Permanent Income*), dan pendapatan sementara (*Transitory Income*). Pendapatan permanen yang dimaksud adalah kesetabilan

⁶¹Ahmad Muslim, “Peranan Konsumsi Dalam Perekonomian Indonesia Dan Kaitannya Dengan Ekonomi Islam”, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, Vol . 1, No. 2, September 2011, 72

⁶²Nurlaila Hanum, “Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Prilaku Konsumsi Mahasiswa universitas Samudradi Kota Langsa”, Dalam *JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA*, VOL. 1, NO. 2 OKTOBER 2017, Hlm. 109

konsumsi yang akan dijaga sepanjang hidup, dimana tingkat kekayaan dan pendapatan yang dibelanjakan sekarang dan kemudian adalah tetap. Sedangkan pendapatan permanen dapat diperoleh dari upah atau gaji tetap yang diterima, atau pendapatan dari semua faktor yang menentukan kekayaan. Friedman menyimpulkan bahwa konsumsi permanen seseorang konsumen atau suatu masyarakat mempunyai hubungan yang positif dan proposional dengan pendapatannya atau pendapatan mereka yang bersangkutan. Sedangkan Rahardja dan Manurung, pendapat PIH yang menyatakan bahwa tingkat konsumsi mempunyai hubungan proposional dengan pendapatan permanen (*Permanent Income*) yaitu:

$$C = \lambda Y_p$$

Dimana:

C = Konsumsi

Y_p = Pendapatan Permanen

λ = Faktor Proporsi, ($\lambda > 0$)

Yang dimaksud disini dengan pendapatan permanen adalah tingkat pendapatan rata-rata yang diekspektasi atau diharapkan jangka panjang. Sumber pendapatan ini berasal dari pendapatan upah/gaji (*Expected Labour Income*) dan nonupah/nongaji (*Expected Income From assets*). Pendapatan permanen akan meningkat bila individu menilai kualitas dirinya (*Human Wealth*) makin baik, mampu bersaing dipasar. Pendapatan saat ini tidak selalu sama dengan pendapatan permanen. Kadang-kadang pendapatan saat ini lebih besar dari pada pendapatan permanen. Kadang-kadang sebaliknya. Hal ini menyebabkannya adalah adanya

pendapatan tidak permanen, yang besarnya berubah-ubah. Pendapatan ini disebut pendapatan transitory (*Transitory Income*).

$$Y_d = Y_p + Y_t$$

Dimana:

Y_d = Pendapatan Disposabel saat ini

Y_p = Pendapatan Permanen

Y_t = Pendapatan Transitori

2.3.5 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat konsumsi rumah tangga dapat diklarifikasikan menjadi tiga besar diantaranya yaitu: faktor ekonomi, faktor demografi (kependudukan), faktor non ekonomi.⁶³

A. Faktor Ekonomi

Empat faktor yang menentukan tingkat konsumsi adalah:

- 1) Pendapatan rumah tangga Pendapatan adalah jumlah seluruh uang yang diterima oleh seseorang atau rumah tangga selama jangka waktu tertentu. Dimana pendapatan terdiri dari upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari kekayaan seperti sewa, bunga, atau deviden serta pembayaran transfer atau penerimaan dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran.⁶⁴

⁶³ Pratama Rahardja, Mandala Manurung, “*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ke Tiga*”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2008), H. 264

⁶⁴ Paul. A Samuelson , William D Nordhaus, “*Mikro Ekonomi, Edisi Keempat Belas*”, (Jakarta: Erlangga, 1992), Hlm. 258

Pendapatan rumah tangga amat besar pengaruhnya terhadap tingkat konsumsi, semakin tinggi tingkat pendapatan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Karena ketika tingkat pendapatan meningkat, kemampuan rumah tangga untuk membeli aneka kebutuhan konsumsi menjadi makin besar, atau mungkin juga pola hidup menjadi konsumtif.

- 2) Kekayaan Rumah Tangga Tercakup dalam pengertian kekayaan rumah tangga adalah kekayaan riil (misalnya rumah, tanah, dan mobil) *Finansial* (deposito berjangka, saham dan surat-surat berharga). Kekayaan-kekayaan tersebut dapat meningkatkan konsumsi, karena menambah pendapatan disposibel.⁶⁵
- 3) Jumlah barang tahan lama dalam masyarakat Konsumsi masyarakat juga dipengaruhi oleh jumlah barang konsumsi tahan lama (*Consumers Durables*). Pengaruh terhadap tingkat konsumsi bisa bersifat positif (menambah) dan negatif (mengurangi).
- 4) Tingkat bunga Tingkat bunga tinggi dapat mengurangi atau mengerem keinginan konsumsi baik dilihat dari sisi keluarga yang memiliki kelebihan uang maupun yang kekurangan uang. Dengan tingkat bunga yang tinggi, maka biaya ekonomi (*Opportunity Cost*) dari kegiatan.

konsumsi akan semakin mahal bagi mereka yang ingin mengkonsumsi dengan berhutang terlebih dahulu, misalnya dengan meminjam dari bank atau menggunakan fasilitas kartu kredit, biaya bunga semakin mahal, sehingga lebih baik menunda atau mengurangi konsumsi.

⁶⁵Pratama Rahardja, Mandala Manurung, *Op.Cit.....*, Hlm. 264.

- 5) Perkiraan tentang masa depan Jika rumah tangga memperkirakan masa depannya makin baik, mereka akan lebih leluasa untuk melakukan konsumsi. Karena penggunaan konsumsi cenderung makin jelek, merekapun mengambil ancang-ancang dengan menekan pengeluaran konsumsi.

B. Faktor-faktor demografi

Terdapat 2 faktor yang tercakup dalam faktor demografi yakni:⁶⁶

1) Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang besar akan memperbesar pengeluaran konsumsi secara menyeluruh, walaupun pengeluaran rata-rata per orang atau per keluarga relatif rendah.

2) Komposisi penduduk

Komposisi penduduk suatu negara dapat dilihat dari beberapa klasifikasi, diantaranya: usia (produktif dan tidak produktif), pendidikan (rendah, menengah, tinggi), dan wilayah tinggal (perkotaan dan pedesaan). Pengaruh komposisi penduduk terhadap tingkat konsumsi dijabarkan sederhana seperti di bawah ini:

- a) Semakin banyak penduduk yang berusia kerja atau usia produktif (15-64), makin besar tingkat konsumsinya, terutama bila sebagian besar dari mereka mendapat kesempatan kerja yang tinggi, dengan upah yang baik. Sebab makin banyak penduduk yang bekerja, penghasilan juga semakin besar.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 267

- b) Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat, tingkat konsumsinya juga semakin tinggi, kebutuhan hidupnya makin banyak. Yang harus mereka penuhi bukan hanya sekedar kebutuhan untuk makan dan minum, akan tetapi juga kebutuhan informasi, pergaulan masyarakat yang lebih baik serta kebutuhan akan pengakuan orang lain terhadap keberadaannya (eksistensinya). Seringkali biaya yang dikeluarkan untuk kebutuhan ini lebih besar daripada biaya kebutuhan untuk makan dan minum.
- c) Makin banyak penduduk yang tinggal di wilayah perkotaan, pengeluaran konsumsinya juga semakin tinggi. Sebab umumnya pola hidup masyarakat perkotaan lebih konsumtif dibandingkan masyarakat pedesaan.

C. Faktor-faktor Non-Ekonomi

Faktor-faktor non ekonomi yang mempengaruhi besarnya konsumsi adalah faktor sosial budaya masyarakat. Misalnya saja berubahnya pola sosial budaya makan, perubahan etika dan tata nilai karena ingin meniru masyarakat lain yang dianggap lebih hebat (*Tipe Ideal*). Contoh paling kongkret di Indonesia adalah berubahnya kebiasaan berbelanja dari pasar tradisional ke pasar swalayan. Begitu juga kebiasaan makan dari makan masakan yang disediakan ibu dirumah menjadi kebiasaan makan di restaurant atau pusat-pusat jajanan yang menyediakan makanan cepat saji (*Fast Food*).⁶⁷

2.3.5. Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga

Rumah tangga atau bisa dikatakan dengan keluarga. Keluarga adalah unit satuan masyarakat yang terkecil sekaligus merupakan suatu kelompok kecil dalam

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 268

masyarakat. Keluarga biasanya terdiri dari suami, istri dan anak-anaknya.⁶⁸ Menurut Ki Hajar Dewantara, Keluarga adalah kumpulan beberapa orang yang karena terikat oleh satu turunan lalu mengerti dan merasa berdiri sebagai satu gabungan yang hakiki, esensial, enak dan berkehendak bersama-sama mempertahankan gabungan itu untuk memuliakan masing-masing anggotanya.⁶⁹ Sedangkan menurut Durkheim, keluarga adalah lembaga social hasil faktor-faktor politik, ekonomi dan lingkungan.

Sebuah keluarga memiliki beberapa fungsi yang harus di penuhi dalam keluarga tersebut diantaranya yaitu:⁷⁰

a. Fungsi Biologis

Dengan fungsi ini diharapkan agar keluarga dapat menyelenggarakan persiapan-persiapan perkawinan bagi anak-anaknya. Karena dengan perkawinan akan terjadi proses kelangsungan keturunan. Dan setiap manusia pada hakikatnya terdapat semacam tuntutan biologis bagi kelangsungan hidup keturunannya, melalui perkawinan.

b. Fungsi Pemeliharaan

Keluarga diwajibkan untuk berusaha agar setiap anggota-anggotanya dapat terlindung dari gangguan-gangguan yang membahayakan.

c. Fungsi Ekonomi

Keluarga berusaha menyelenggarakan kebutuhan manusia yang pokok yaitu:

(1) Kebutuhan makan dan minum,

⁶⁸ Abu Ahmadi, "*Ilmu Sosial Dasar*", (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hlm. 87

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 96

⁷⁰ Abu Ahmadi, "*Ilmu Sosial Dasar*,,,,,,,", hlm. 89-91

- (2) Kebutuhan pakaian untuk menutup tubuhnya,
- (3) Kebutuhan tempat tinggal. Berhubung dengan fungsi penyelenggaraan kebutuhan pokok ini maka orang tua diwajibkan untuk berusaha keras agar supaya setiap anggota keluarga dapat cukup makan dan minum, cukup pakaian serta tempat tinggal.

d. Fungsi Keagamaan

Setiap keluarga diwajibkan untuk menjalani dan mendalami serta mengamalkan ajaran agama dalam pelakunya sebagai manusia yang taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

e. Fungsi Sosial

Dalam fungsi ini keluarga berusaha untuk mempersiapkan anaknya bekal-bekal selengkapnya dengan memperkenalkan nilai-nilai dan sikap-sikap yang dianut oleh masyarakat serta mempelajari peranan-peranan yang diharapkan akan mereka jalankan kelak bila sudah dewasa. Dengan fungsi ini diharapkan agar di dalam keluarga selalu terjadi pewarisan kebudayaan atau nilai-nilai kebudayaan seperti sopan-santun, bahasa, cara bertingkah laku, ukuran tentang baik buruknya perbuatan, dll.

Jadi dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa konsumsi rumah tangga adalah tingkat pengeluaran yang harus dipenuhi oleh keluarga guna untuk menjalankan fungsi dari sebuah keluarga dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

2.3.6 Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Konsumsi Masyarakat

Menurut Suparmoko terdapat beberapa variabel yang mempengaruhi konsumsi selain dari pendapatan, meliputi:⁷¹

- a. Selera Konsumsi masing-masing individu berbeda meskipun individu tersebut mempunyai umur dan pendapatan yang sama, hal ini disebabkan karena adanya perbedaan selera pada tiap individu.
- b. Faktor Sosial Ekonomi Faktor sosial ekonomi misalnya umur, pendidikan, dan keadaan keluarga juga mempunyai pengaruh terhadap pengeluaran konsumsi. Pendapatan akan tinggi pada kelompok umur muda dan mencapai puncaknya pada umur pertengahan dan akhirnya turun pada umur tua.
- c. Kekayaan Kekayaan secara eksplisit maupun implisit sering dimasukkan dalam fungsi agregat sebagai faktor yang menentukan konsumsi. Seperti dalam pendapatan permanen yang dikemukakan oleh Friedman, Albert Ando dan Franco Modigliani menyatakan bahwa hasil bersih dari suatu kekayaan merupakan faktor penting dalam menentukan konsumsi. Beberapa ahli ekonomi yang lain memasukan aktiva lancar sebagai komponen kekayaan sehingga aktiva lancar memainkan peranan yang penting pula dalam menentukan konsumsi.
- d. Keuntungan atau Kerugian Capital Keuntungan capital yaitu dengan naiknya hasil bersih dari kapital akan mendorong tambahnya konsumsi, sebaliknya dengan adanya kerugian kapital akan mengurangi konsumsi.

⁷¹ Suparmoko, "*Pengantar Ekonomi Makro*", (Yogyakarta: BPFE, 1998), hlm.79-81

- e. Tingkat Bunga Ahli-ahli ekonomi klasik menganggap bahwa konsumsi merupakan fungsi dari tingkat bunga. Khususnya mereka percaya bahwa tingkat bunga mendorong tabungan dan mengurangi konsumsi.
- f. Tingkat Harga Sejauh ini dianggap konsumsi riil merupakan fungsi dari pendapatan riil. Oleh karena itu naiknya pendapatan nominal yang disertai dengan naiknya tingkat harga dengan proposi yang sama tidak akan merubah konsumsi riil.

Selain faktor diatas dalam buku lain menyebutkan bahwa faktor-faktor penentu jumlah konsumsi adalah :⁷²

- (1) pendapatan disposabel (pendapatan siap dikonsumsi),
- (2) pendapatan permanen (pendapatan tahun ini saja yang digunakan dalam konsumsi),
- (3) Kekayaan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai instrumen moneter syariah bank indonesia (SBIS), fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS), tingkat konsumsi rumah tangga, dan tingkat konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap inflasi telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Peneliti-peneliti tersebut banyak memberikan masukan serta memberikan cara bagaimana mengatasi terjadinya inflasi hingga menjadi stabil kembali seperti semula sehingga produsen

⁷² Paul A Samuelson & William D.Nordhaus, "*Economics (Ekonomi)*, terj.Jaka Wasana", (Jakarta: Erlangga, 1988), hlm. 169-171

dapat menciptakan produk yang lebih banyak. Beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan berdasarkan berikut ini:

Hasil penelitian sebelumnya dilakukan oleh Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000:1-2011:4”. Penelitiannya menggunakan metode OLS menyimpulkan bahwa, variabel PDB dan SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, variabel JUB (M2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi sedangkan variabel kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi.

Khairina Tambunan (2016) yang berjudul “Nilai Reksadana Konvensional Reksadana Syariah Fasilitas Simpanan Pada Bank Indonesia Syariah (FASBIS) ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya”. Penelitiannya menggunakan GDP Riil metode Ordinary Least Square (OLS) Hasil penelitian secara serempak menunjukkan bahwa sekitar 97,2% variabel Reksadana Syariah, Reksadana Konvensional, FASBIS, ZIS dan PDB periode sebelumnya mempengaruhi PDB riil Indonesia sebagai indikator pertumbuhan ekonomi periode 2013-2015, sedangkan sisanya 2,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Reksadana konvensional memberi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, Reksadana Syariah memberikan pengaruh positif terhadap PDB riil Indonesia, FASBIS memberi pengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia, ZIS memberi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, dan PDB periode sebelumnya juga memberi pengaruh positif terhadap

perekonomian Indonesia. Secara parsial, reksadana syariah yang belum terlihat mempengaruhi secara signifikan.

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Bagus Widyanto (2008) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga”. Penelitiannya menggunakan metode regresi linier berganda menyimpulkan bahwa hasil studi menunjukkan bahwa variabel pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh.

Hasil penelitian selanjutnya adalah Nurhayati dan Rachman (2003), dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi masyarakat di propinsi jawa tengah pada tahun 2000”, dalam penelitiannya menggunakan metode regresi linier berganda dengan variabel pendapatan nasional, jumlah penduduk dan inflasi. Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil bahwa pendapatan nasional mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada tingkat $\alpha = 1\%$ dan hasil regresi yang diperoleh adalah nilai koefisien sebesar 0,403 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pendapatan nasional akan menyebabkan pengeluaran konsumsi masyarakat naik sebesar 0,403 juta rupiah. Hubungan tersebut sesuai dengan teori yang ada dimana fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara konsumsi dan tingkat pendapatan apa bila pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat.

Hasil penelitian selanjutnya adalah Wulan Asnuri (2013), dengan judul “Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap

Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia, Instrumen Moneter Syariah, SBIS, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi. Dan selanjutnya adalah Tia Enggistiani Junandi (2013), dengan judul “Efektivitas Instrumen Moneter Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dengan Metode VAR/VECM” Instrumen Moneter Syariah SBIS, PUAS terhadap Kinerja Perbankan Syariah.

Beberapa penelitian terdahulu dapat dijelaskan berdasarkan tabel berikut ini:

Tabel 2.1.
Perbedaan Dan Persamaan Penelitian Terdahulu

Nama	Judul	Hasil	Perbedaan	Persamaan
Wahyu Bagus Widyanto	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi konsumsi rumah	Menunjukkan bahwa variabel pendapatan tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh.	Penelitian terdahulu menggunakan metode regresi linier berganda sedangkan penelitian sekarang menggunakan analisis regresi linier berganda.	Kedua penelitian sama-sama menggunakan variabel pendapatan tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh signifikan terhadap inflasi.
Khairina Tambunan	Nilai reksadana	Menunjukkan bahwa sekitar	Penelitian terdahulu	Kedua penelitian sama-sama

	konvensional reksadana syariah fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS) , ZIS (Zakat, Infak dan Sedekah) produk domestik bruto.	97,2% variabel reksadana syariah, reksadana konvensional, FASBIS, ZIS dan PDB sebelumnya mempengaruhi PDB riil indonesia sebagai indikator pertumbuhan ekonomi periode 2013-2015, sedangkan sisanya 2,8% dijelaskan oleh faktor lain.	menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square sedangkan penelitian sekarang menggunakan uji asumsi klasik.	berpegaruh positif dan signifikan terhadap variabel yg diteliti
Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki	Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi di indonesia periode 2000:1-2011:4	Menunjukkan bahwa variabel PDB dan SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi sedangkan variabel kurs berpengaruh	Penelitian terdahulu menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square) sedangkan penelitian sekarang menggunakan	Kedua penelitian sama-sama bahwa SBI dan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi.

		positif dan tidak signifikan terhadap inflasi.	metode uji asumsi klasik.	
Nurhayati dan Rachamn	Analisis faktor-factoryang mempengaruhi fungsi konsumsi masyarakat di propinsi jawa tengah pada tahun 2000	Bahwa pendapatan nasional mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada tingkat =1%.	Penelitian terdahulu menggunakan regresi linier berganda dengan variabel pendapatan nasional, jumlah penduduk dan inflasi, sedangkan penelitian sekarang menggunakan regresi linier berganda dengan variabel SBIS, FASBIS, konsumsi rumah tangga, dan	Kedua penelitian sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat.

			konsumsi masyarakat.	
Tia Enggistia ni Junandi	Efektivitas Instrumen Moneter Syariah Terhadap Kinerja Perbankan Syariah Di Indonesia dengan Metode VAR/VECM.	Instrumen Moneter Syariah SBIS, PUAS terhadap Kinerja Perbankan Syariah.	Penelitian terdahulu menggunakan metode VAR/VECM, sedangkan penelitian sekarang menggunakan metode regresi linier berganda.	Kedua penelitian sama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap instrument moneter syariah SBIS dan PUAS
Wulan Asnuri	Pengaruh Instrumen Kebijakan Moneter Syariah dan Ekspor Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	Instrumen Moneter Syariah, SBIS, Ekspor dan Pertumbuhan Ekonomi	Penelitian terdahulu mengenai instrumen kebijakan moneter syariah dan ekspor pertumbuhan ekonomi	Kedua penelitian sama-sama berpengaruh terhadap instrument moneter syariah , SBIS dan PUAS.

	Di Indonesia		sedangkan penelitian sekarang instrumen moneter syariah dan tingkat konsumsi terhadap inflasi	
--	--------------	--	---	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan uraian penelitian sebelumnya, maka disusun suatu kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan. Kerangka pemikiran mengenai penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir



Kerangka berfikir di atas menunjukkan bahwa Inflasi diduga dipengaruhi faktor-faktor berupa Sertifikat Bank Indonesia (SBIS), Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS), Tingkat Konsumsi Rumah Tangga, dan Tingkat Konsumsi Pemerintah.

2.6 Hipotesis

Hipotesis pada dasarnya adalah dugaan atau jawaban sementara dari pertanyaan yang ada pada perumusan masalah penelitian. Dikatakan jawaban sementara adalah karena jawaban yang ada adalah jawaban yang berasal dari teori. Adapun Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Berdasarkan uraian di latar belakang dan tinjauan pustaka, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_{01} = *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* tidak berpengaruh terhadap Inflasi

H_{a1} = *Sertifikat Bank Indonesia Syariah* berpengaruh terhadap Inflasi

H_{02} = *Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah* tidak berpengaruh terhadap Inflasi

H_{a2} = *Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah* berpengaruh terhadap Inflasi

H_{03} = *Konsumsi Rumah Tangga* tidak berpengaruh terhadap Inflasi

H_{a3+} = *Konsumsi Rumah Tangga* berpengaruh terhadap Inflasi

H_{04} = *Konsumsi Pemerintah* tidak berpengaruh terhadap Inflasi

H_{a4} = *Konsumsi Pemerintah* berpengaruh terhadap Inflasi

H_{05} = *Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah*, bersama-sama

tidak berpengaruh terhadap Inflasi

H_{a5} = *Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah* mempunyai pengaruh terhadap Inflasi

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Penelitian dengan pendekatan kuantitatif menekankan analisisnya pada data-data *Numerical* (angka-angka) yang diolah dengan metode statistik. Pendekatan kuantitatif mementingkan adanya variabel-variabel sebagai objek penelitian, dan variabel-variabel tersebut harus didefinisikan dalam bentuk operasionalisasi dari masing-masing variabel. Dalam penelitian kuantitatif memerlukan adanya hipotesis dan pengujian yang kemudian akan menentukan tahapan-tahapan berikutnya, seperti penentuan teknik analisa dan uji statistik yang akan digunakan. Pendekatan kuantitatif ini memberikan makna dalam hubungannya dengan penafsiran angka statistik, bukan makna secara kebahasaan dan klaturalnya. Tujuan akhir yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dengan pendekatan kuantitatif ini adalah menguji teori, membangun fakta, menunjukkan hubungan dan pengaruh variabel-variabel yang diteliti.⁷³

3.2 Lokasi Dan Waktu Penelitian

Pada penelitian ini yang dijadikan tempat penelitian adalah wilayah Indonesia dan penelitian dilakukan pada tahun 2015 hingga tahun 2019. Adapun yang akan dibahas terbatas hanya pada pengaruh sertifikat bank indonesia syariah, fasilitas simpanan bank indonesia syariah, tingkat konsumsi rumah tangga, dan tingkat konsumsi pemerintah terhadap variabel dependen, yakni inflasi. Sebagai

⁷³Sofian Siregar, “*Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012), Hlm. 30

variabel independen pada penelitian ini adalah yang diberi lambang sertifikat bank indonesia syariah (X1), fasilitas simpanan bank indonesia syariah (X2), Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X2), dan tingkat konsumsi pemerintah (X4) terhadap Inflasi. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah Inflasi yang diberi lambang (Y).

3.3 Populasi Dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian.⁷⁴

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wilayah indonesia yang bersangkutan dengan sertifikat bank indonesia syariah (SBIS), fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS), tingkat konsumsi rumah tangga, dan tingkat konsumsi pemerintah.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan penelitian tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi. Akan tetapi apabila penelitian menggunakan teknik wawancara (*Interview*) atau pengamatan jumlah tersebut dapat dikurangi menurut teknik pengambilan sampel sesuai dengan kemampuan peneliti.⁷⁵

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan adalah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* merupakan metode penetapan sampel dengan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu.⁷⁶

⁷⁴Nanang Martono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), Hlm. 66

⁷⁵Sugiyono, “*Metode Penelitian Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, 2007), Hlm. 116

⁷⁶Suliyanto, “*Metode Riset Bisnis*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006), Hlm. 125

3.4 Data Penelitian

Secara garis besar, jenis data dibagi kedalam beberapa kelompok yaitu berdasarkan cara memperolehnya, waktu pengumpulannya, dan sifatnya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan cara memperolehnya adalah data sekunder, yaitu data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya.⁷⁷ Data ini berdasarkan waktu pengumpulannya termasuk kedalam kategori data *time series*, yaitu data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu dalam satu objek, dengan tujuan untuk menggambarkan perkembangan dari objek tersebut yang dalam hal ini diambil periode penelitian tahun 2015-2019. Sedangkan berdasarkan sifatnya jenis data dalam penelitian ini merupakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka. Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data inflasi sampel tahun 2015-2019
2. Data sertifikat bank indonesia syariah (SBIS) sampel tahun 2015-2019
3. Data fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS) sampel tahun 2015-2019
4. Data tingkat konsumsi rumah tangga sampel tahun 2015-2019
5. Data tingkat konsumsi pemerintah sampel tahun 2015-2019

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari :

- a. Website (www.bps.go.id)
- b. Website (www.bi.go.id)

⁷⁷Sofian Siregar, “*Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012), Hlm. 30

3.5 Variabel-variabel Penelitian

Data yang diteliti dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua variabel yaitu suatu variabel yang diduga dapat mempengaruhi keragaman variabel lain yang menyertainya. Variabel dependen dan variabel independen. Variabel independen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat dari adanya variabel independen. Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen (terikat) dan dua variabel independen.

3.5.1 Variabel dependen

Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu inflasi di Indonesia periode Januari 2015-Juni 2019.

3.5.2 Variabel independen

Variabel independen yang digunakan yaitu Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga Dan Konsumsi Pemerintah periode Januari 2015-Juni 2019.

3.6 Metode Analisis Data

Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu akan dilakukan uji instrumen yang digunakan sebagai alat ukur. Uji ini meliputi uji validitas dan reliabilitas. Setelah uji instrumen kemudian baru dilakukan teknik analisis data.⁷⁸

3.6.1 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi pada *Model Regresi Linear OLS* agar model tersebut menjadi valid sebagai alat pendugaan.

⁷⁸ Sugiyono, 2011, "*Metodologi Penelitian.....*", Hlm. 182.

Regresi linear sederhana atau disebut dengan *Simple Linear Regression*, adalah regresi linear dengan satu variabel bebas dan satu variabel terikat.⁷⁹

Uji konsumsi klasik dilakukan untuk melihat atau menguji suatu model yang termasuk layak atau tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah :⁸⁰

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual berdistribusi normal.⁸¹

Uji Normalitas data ini sebaiknya dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian. Uji normalitas ini bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian. Data yang baik dan layak digunakan dalam penelitian adalah data yang memiliki distribusi normal.⁸²

Normalitas data dapat dilihat dengan menggunakan uji Normal. Untuk mengujinya dilakukan dengan uji statistik *Non Parametric Kolmogorov-Smirnov*. Jika *Kolmogorov-Smirnov* dan *Untandardized Residual Asymp Sig (2-tailed) > 0,05* berarti lolos uji normalitas, sebaliknya jika nilai *Kolmogorov-Smirnov* dan *Untandardized Residual Asymp Sig (2-tailed) < 0,05* berarti tidak lolos uji normalitas.⁸³

⁷⁹ Dedi Rosdi, “*Ekonometrika Dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*” (Yogyakarta : Ndi Offset, 2012), Hlm. 61

⁸⁰ Ibid. Hlm. 63

⁸¹ Sugiyono, “*Metodologi Penelitian.....*”; Hlm. 160

⁸² Wiratna Sujarweni, “*SPSS Untuk Penelitian*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), Hlm. 185

⁸³ Ibid, Hlm. 188

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. *Uji Multikolinearitas* dapat dilihat dari *Variance Inflation Faktor* (VIF) dan nilai *Tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya. Multikolinearitas terjadi jika nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan $VIF > 10$. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (Lolos Uji Multikolinearitas).⁸⁴

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *Variance* dari *Residual* satu pengamatan kepengamatan yang lain.⁸⁵

Uji heteroskedastisitas menguji terjadinya perbedaan variance residual suatu periode pengamatan ke periode periode pengamatan yang lain. Cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas pada suatu model dapat dilihat dengan pola gambar scatterplot, regresi yang tidak terjadi heteroskedastisitas jika titik-titik data menyebar diatas dan dibawah atau disekitar angka 0, titik-titik data tidak mengumpul hanya diatas atau dibawah saja, penyebaran titik-titik data tidak boleh membentuk pola bergelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali, penyebaran titik-titik data tidak berpola.⁸⁶

⁸⁴Imam Ghozali, “Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS.....”, Hlm. 95

⁸⁵*Ibid.*, Hlm. 139.

⁸⁶*Ibid* , Hlm. 130

d. Uji Autokorelasi

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode ke t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah bebas dari autokorelasi. Salah satu cara mengidentifikasinya adalah dengan melihat nilai Durbin Watson (D-W):⁸⁷

Tabel 2.1. pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi

Hipotesis Nol	Kepusuan	Jika
Tidak ada autokorelasi positif	Tolak	$0 < d < dl$
Tidak ada autokorelasi positif	<i>No Decision</i>	$dl < d < du$
Tidak ada kolerasi negatif	Tolak	$4 - dl < d < 4$
Tidak ada kolerasi negatif	<i>No Decision</i>	$4 - du < d < 4 - dl$
Tidak ada autokorelasi, positif atau negatif	Tidak Ditolak	$du < d < 4 - dl$

Kriterianya jika $du < d < 4 - du$, maka tidak terjadi autokorelasi.⁸⁸

3.6.2 Analisis Regresi Linier Berganda

a. Persamaan Regresi Linier Berganda

Analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda adalah sebuah teknik yang bertujuan untuk mengetahui hubungan dari satu atau dua variabel bebas (*Independen*) dan variabel terikat. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui bagaimana

⁸⁷*Ibid.*, h. 173

⁸⁸Albert Kurniawan, "*Metode Riset Untyk Ekonomi Dan Bisnis*", (Bandung: Alfabeta, 2014), Hlm. 158

variabel dependen dapat diprediksi melalui variabel independen atau prediktor, secara parsial maupun simultan. Adapun rumusnya adalah :⁸⁹

$$Y = \alpha + b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3 + b_4 x_4$$

keterangan:

- 1) Y : Inflasi
- 2) α : Konstanta
- 3) $b_1 b_2 b_3 b_4$: Koefisien korelasi ganda
- 4) x_1 : Sertifikat bank indonesia syariah
- 5) x_2 : Fasilitas simpanan bank indonesia syariah
- 6) x_3 : Tingkat konsumsi rumah tangga
- 7) x_4 : Tingkat konsumsi pemerintah

b. Uji Parsial (Uji t)

Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa besar pengaruh satu variabel penjelas/independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengambilan kesimpulannya adalah dengan melihat nilai signifikansi yang dibandingkan dengan nilai α (5 %) dengan ketentuan sebagai berikut:⁹⁰

1. Jika nilai Sig < α maka H_0 ditolak
2. Jika nilai Sig > α maka H_0 diterima

⁸⁹ Imam Ghozali, "Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS", (Semarang, Badan Penerbit UNDIP, 2005), Hlm. 81-110.

⁹⁰*Ibid.*, Hlm. 89.

c. Uji simultan (Uji F)

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Derajat kepercayaan yang digunakan adalah 0,05.

Pengujian ini dapat dilakukan melalui pengamatan nilai signifikan F pada tingkat $\alpha=5\%$. Analisis didasarkan pada perbandingan antara nilai signifikansi sebesar 5% dengan syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Jika sig. $F > 0,05$ maka H_0 ditolak yang berarti variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika sig. $F < 0,05$ maka H_0 diterima yaitu variabel-variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.⁹¹

d. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien ini antara 0 dan 1, jika hasil lebih mendekati angka 0 maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel amat terbatas. Tapi jika mendekati angka 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

⁹¹Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS,....*, h. 87

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Penelitian Hasil Penelitian

Bank Indonesia (BI) diberikan mandat untuk menyelenggarakan fungsi Bank Sentral di Indonesia. Hingga saat ini BI mengalami evolusi yang bermula sebagai bank komersial yang kemudian berkembang menjadi bank sirkulasi dan selanjutnya menjadi Bank Sentral yang modern dengan tujuan yang fokus serta independen sesuai dengan amanat UU No. 23/1999 Tentang BI yang kemudian diamandemen menjadi UU No. 3/2004 Tentang BI.⁹²

BI berawal dari De Javasche Bank NV (DJB) yang didirikan oleh pemerintah hindia Belanda pada tanggal 24 Januari 1827. Pada waktu itu, DJB bertindak sebagai bank sirkulasi dan menjalankan beberapa fungsi Bank Sentral lainnya serta melakukan kegiatan Bank Umum. Pemerintah Belanda memberikan hak oktrooi kepada DJB, yaitu hak untuk mencetak dan mengedarkan uang Gulden Belanda.

Pada perkembangan selanjutnya, pada tanggal 06 Desember 1951 Pemerintah Indonesia mengeluarkan UU tentang nasionalisasi DJB. Selanjutnya pada tanggal 01 Juli 1953 dikeluarkan UU No.11 Tahun 1953 Tentang pokokpokok Bank Indonesia. Sejak berlakunya Undang-Undang Pokok Bank Indonesia pada tanggal 01 Juli 1953, maka bangsa Indonesia telah memiliki

⁹² Repository. Uinsu.ac.id

sebuah lembaga Bank Sentral dengan nama Bank Indonesia (BI), sejak saat itu, BI secara resmi menjadi Bank Sentral menggantikan fungsi DJB. Hingga tahun 1968, tugas pokok BI sebagai Bank Sentral, selain menjaga stabilitas moneter, mengedarkan uang dan mengembangkan sistem perbankan, juga masih tetap melaksanakan fungsi bank umum (bank komersial). Meskipun demikian, tanggung jawab kebijakan moneter berada di pihak Dewan Moneter (DM) yang dibentuk oleh pemerintah. Tugas DM adalah menentukan kebijakan moneter yang harus dilaksanakan oleh BI. Di samping itu, DM juga memberi petunjuk kepada direksi BI dalam menjaga kesetabilan nilai mata uang dan memajukan perkreditan dan perbankan.

Sadar akan kelemahan peran ganda yang dijaminakan oleh BI yaitu kurang sehatnya perkembangan moneter bagi perekonomian, maka pemerintah pada tahun 1968 dikeluarkan UU No. 13 Tahun 1968 Tentang Bank Indonesia. UU ini menghapus peran ganda BI, yakni BI tidak lagi melaksanakan fungsi-fungsi bank komersial. Meskipun demikian, dalam UU ini BI tetap sebagai agen pembangunan dan sebagai kasir pemerintah serta bankers ban. Di samping itu, UU ini tetap mempertahankan tugas dan fungsi DM. Tugas pokok BI sebagai agen pembangunan terlihat pada tugas pokoknya, pertama mengatur, menjaga, dan memelihara stabilitas nilai Rupiah, kedua mendorong kelancaran produksi dan pembangunan, serta ketiga memperluas kesempatan kerja guna meningkatkan taraf hidup masyarakat.⁹³

⁹³ Repository. Uinsu.ac.id

4.1.2. Visi Misi Bank Indonesia

Menjadi lembaga Bank Sentral yang kredibel dan terbaik di regional melalui penguatan nilai-nilai strategis yang dimiliki serta pencapaian yang rendah dan nilai tukar yang stabil adalah merupakan visi dari Bank Indonesia.

Selain itu Bank Indonesia juga memiliki Misi, yaitu:

1. Mencapai stabilitas nilai rupiah dan menjaga efektivitas transmisi kebijakan moneter untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2. Mendorong sistem keuangan nasional bekerja secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap gejolak internal dan eksternal untuk mendukung alokasi sumber pendanaan/pembiayaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
3. Mewujudkan sistem pembayaran yang aman, efisien, dan lancar yang berkontribusi terhadap perekonomian, stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan dengan memperhatikan aspek perluasan akses dan kepentingan nasional.
4. Meningkatkan dan memelihara organisasi dan SDM Bank Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai strategis dan berbasis kinerja, serta melaksanakan tata kelola (*Governance*) yang berkualitas dalam rangka melaksanakan tugas yang diamanatkan UU.⁹⁴

⁹⁴ Repository. Uinsu.ac.id

4.2. Data Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil penelitian studi lapangan yang dimulai dari statistik dengan pengambilan data yang berhubungan dengan data penelitian (meliputi gambaran umum responden, variabel penelitian, uji asumsi klasik, uji normalitas, dan analisis regresi berganda), hasil pengujian hipotesis dan pembahasan terhadap uji hipotesis yang diuji secara statistik dengan menggunakan program pengolahan data SPSS versi.20.00.⁹⁵

Penelitian ini melihat pengaruh *sertifikat bank indonesia syariah (SBIS)*, *fasilitas simpanan bank indonesia syariah (FASBIS)*, *tingkat konsumsi rumah tangga dan tingkat konsumsi pemerintah terhadap inflasi*. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tahunan dalam bentuk triwulan 2015 sampai 2019.⁹⁶

Tabel 4.1.
Data Kuantitatif SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah Dan Inflasi Pertahun Dalam Triwulan 2015-2016

NO	Tahun	Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)	Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)	Konsumsi Rumah Tangga	Konsumsi Pemerintah	Inflasi
1.	T1 2015	8,81	1,637	1,559	1,804	0,17
	T2 2015	8,459	1,173	1,59	2,536	0,54
	T3 2015	7,72	1,504	1,668	2,923	-0,05

⁹⁵ *Ibid.,, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. (Jakarta : Gramedia. 1999), Hlm. 175

⁹⁶ *Ibid.,, SPSS Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. (Jakarta : Gramedia. 1999), Hlm. 175-176

	T4 2015	6,28	1,8	1,675	3,977	0,96
2.	T1 2016	7,039	1,584	1,695	2,009	0,19
	T2 2016	7,47	1,426	1,724	2,906	0,66
	T3 2016	9,443	2,115	1,799	2,897	0,22
	T4 2016	1,079	2,393	1,809	4,009	0,42
3.	T1 2017	1,228	2,209	1,838	2,116	-0,02
	T2 2017	9,422	1,839	1,838	2,894	0,69
	T3 2017	1,263	2,213	1,953	3,072	0,13
	T4 2017	1,002	2,838	1,964	4,266	0,71
4.	T1 2018	1,299	2,663	1,993	2,257	0,2
	T2 2018	1,197	1,818	2,036	3,14	0,59
	T3 2018	1,065	2,092	2,115	3,334	-0,18
	T4 2018	8,216	3,259	2,128	4,594	0,62
5.	T1 2019	1,442	1,863	2,149	2,404	0,11
	T2 2019	1,36	2,783	2,212	3,453	0,55

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

4.3. Pergerakan Variabel Penelitian

Analisis pergerakan variabel penelitian dari periode 2015 sampai dengan 2019 adalah sebagai berikut :

4.3.1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) adalah surat berharga berdasarkan prinsip Islam berjangka waktu pendek dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia. Tujuan dikeluarkannya Peraturan Bank Indonesia tentang Sertifikat Bank Indonesia Syariah ini adalah sebagai salah satu instrumen operasi pasar terbuka dalam rangka pengendalian moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.⁹⁷

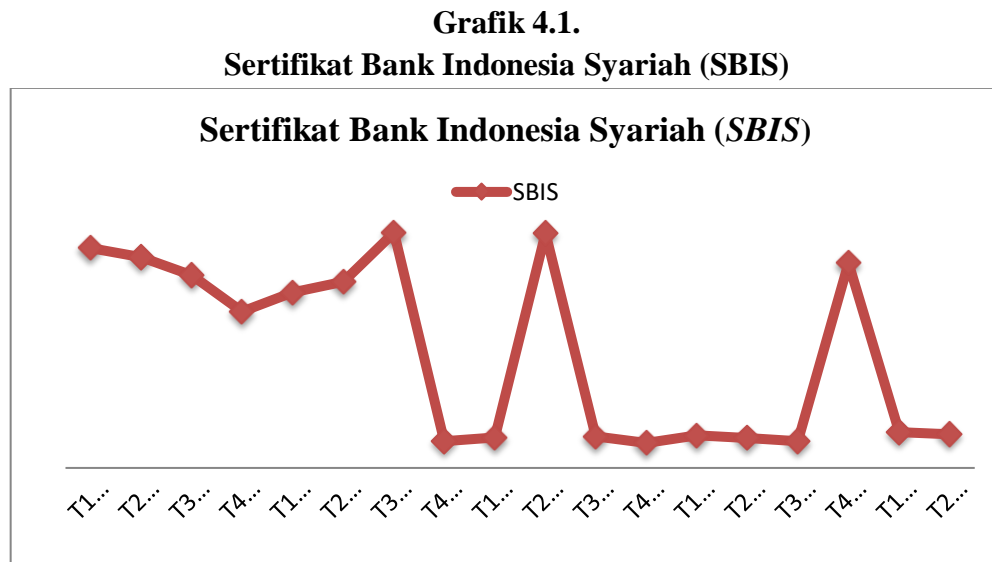
Oleh karena itu Bank Indonesia yg memiliki tugas menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter bahwa dalam rangka mendukung tugas dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia dapat melakukan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah melalui operasi pasar terbuka diperlukan penyempurnaan instrumen dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia berdasarkan prinsip syariah (PBI No. 10/11/PBI/ 2008). SBIS ini yang akan menjadi alternatif bagi bank syariah untuk mengamankan dananya. Karena apabila terjadi inflasi maka masyarakat akan lebih menyukai menyimpan uangnya dibandingkan mengambil pembiayaan di bank syariah.⁹⁸

Data SBIS yang digunakan adalah data SBIS di indonesia yang diperoleh dari SBIS di indonesia dalam periode tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019.

⁹⁷ Desi Nurmaida, “Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi”, Dalam Jurnal J-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 2018, Hlm. 167

⁹⁸ Rahmad Dahlan, “Pengaruh Tingkat Bonus SBIS Dan Tingkat Inflasi Terhadap ...”, EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015, Hlm. 64-65

Data diperoleh dari web Bank Indonesia. Perkembangan SBIS dapat dilihat dari grafik berikut:



Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Grafik di atas merupakan perkembangan rata-rata perkembangan SBIS periode 2015 sampai dengan 2019, perkembangan SBIS dari bank Indonesia cenderung naik turun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa SBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cenderung naik turun tergantung kebutuhan masyarakat.

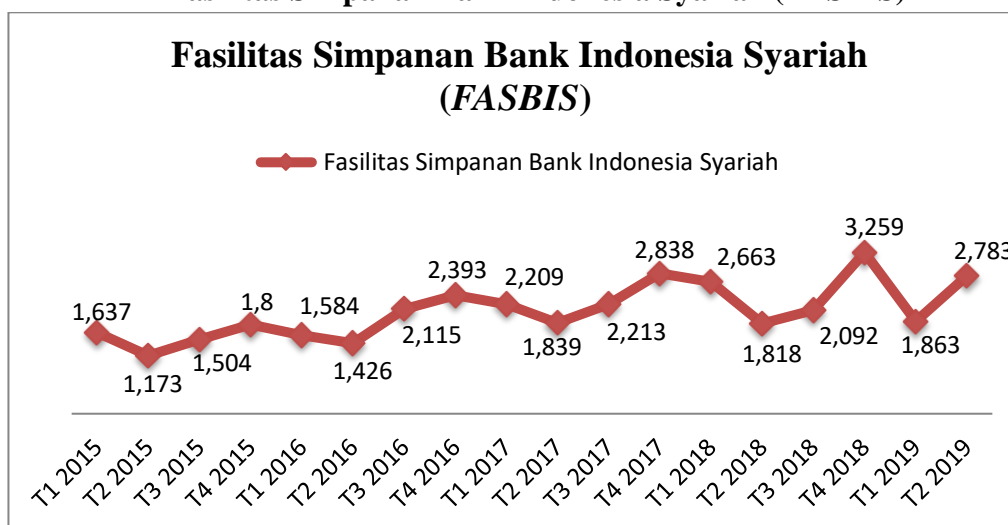
4.3.2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)

FASBIS merupakan instrumen yang digunakan Bank Indonesia untuk absorpsi likuiditas perbankan syariah dalam rangka OMS. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/12/PBI/2014 tentang Operasi Moneter Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah Dalam Rupiah yang selanjutnya disebut FASBIS adalah fasilitas simpanan yang disediakan oleh Bank Indonesia

kepada Bank untuk menempatkan dana di Bank Indonesia dalam rangka Standing Facilities Syariah.⁹⁹

Data FASBIS yang digunakan adalah data FASBIS di Indonesia yang diperoleh dari Bank Indonesia dalam periode tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari web Bank Indonesia. Perkembangan FASBIS dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.2
Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS)



Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Grafik di atas merupakan perkembangan rata-rata perkembangan FASBIS periode 2015 sampai dengan 2019, perkembangan FASBIS dari Bank Indonesia cenderung naik turun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa FASBIS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia cenderung naik turun tergantung kebutuhan masyarakat.

⁹⁹ https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_174315.pdf

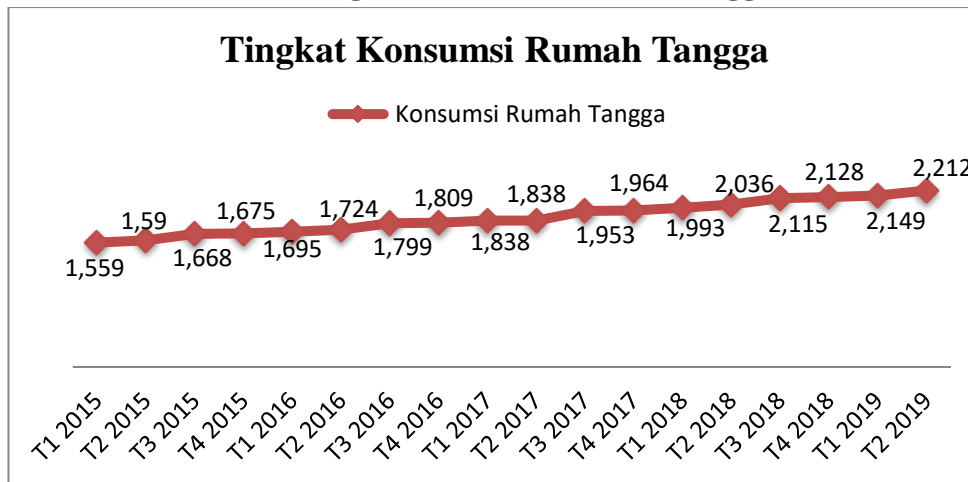
4.3.3. Tingkat Konsumsi Rumah Tangga

Konsumsi dapat diartikan sebagai perbelanjaan yang dilakukan oleh rumah tangga keatas barang-barang akhir dan jasa-jasa dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dari orang yang melakukan perbelanjaan tersebut. Kegiatan konsumsi tidak bisa lepas dari kegiatan masyarakat karena semua orang pasti melakukan konsumsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Keputusan konsumsi sangatlah penting untuk menganalisis jangka panjang karena peranannya dalam pertumbuhan ekonomi, sedangkan pentingnya dalam jangka pendek karena perannya dalam menentukan permintaan agregat.¹⁰⁰

Data Tingkat Konsumsi yang digunakan adalah data Tingkat Konsumsi Rumah Tangga di indonesia yang diperoleh dari Tingkat Konsumsi Rumah Tangga di indonesia dalam periode tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari web Badan pusat statistik. Perkembangan Tingkat Konsumsi Rumah Tangga dapat dilihat dari tabel berikut:

¹⁰⁰Siti Rahmiana, “*Analisis Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Konsumsi Daerah, Investasi Daerah Dan Suku Bunga Kredit Investasi Daerah Terhadap Inflasi Di Provinsi Lampung*”, Skripsi, Lampung, 2016, Hlm. 27

Grafik 4.3
Tingkat Konsumsi Rumah Tangga



Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Grafik di atas merupakan perkembangan rata-rata perkembangan Tingkat Konsumsi Rumah Tangga periode 2015 sampai dengan 2019, perkembangan Konsumsi Rumah Tangga dari Badan Pusat Statistik cenderung naik turun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konsumsi R.T yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik cenderung mengalami kenaikan setiap tahunnya diakibatkan kebutuhan masyarakat.

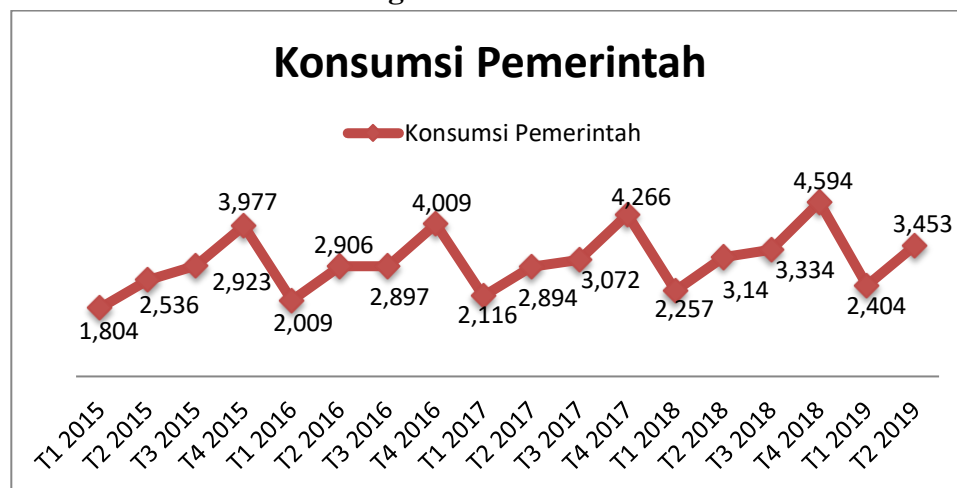
4.3.4. Tingkat Konsumsi Pemerintah

Pengeluaran pemerintah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tercermin dalam realisasi anggaran belanja rutin dan realisasi anggaran belanja pembangunan, sedangkan jumlah seluruh penerimaan meliputi penerimaan dalam negeri dan penerimaan luar negeri yang disebut penerimaan pembangunan. Ditinjau dari tujuannya, pengeluaran rutin merupakan pengeluaran operasional dan mutlak harus dilakukan serta konsumtif, tetapi tidak semua

anggaran belanja rutin dapat dikategorikan sebagai pengeluaran konsumsi (*current expenditure*), misalnya seperti belanja pembelian inventaris kantor, belanja pemeliharaan gedung kantor, dan lain-lain.¹⁰¹

Data Tingkat Konsumsi yang digunakan adalah data Tingkat Pemerintah di Indonesia yang diperoleh dari Tingkat Konsumsi Pemerintah di Indonesia dalam periode tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari web Badan Pusat Statistik. Perkembangan Tingkat Konsumsi Pemerintah dapat dilihat dari tabel berikut:

Grafik 4.4
Tingkat Konsumsi Pemerintah



Sumber data Sekunder (diolah, 2019)

Grafik di atas merupakan perkembangan rata-rata perkembangan Tingkat Konsumsi Pemerintah periode 2015 sampai dengan 2019, perkembangan Konsumsi Pemerintah dari Badan Pusat Statistik cenderung naik turun dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Konsumsi

¹⁰¹ Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng, "Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado" Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado, Hlm. 8

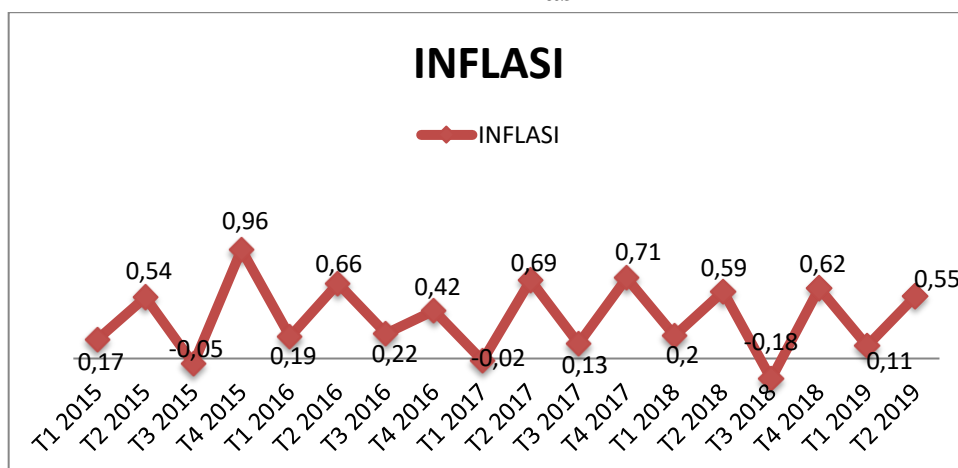
Pemerintah yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik cenderung mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya diakibatkan kebutuhan masyarakat.

4.3.5. Inflasi

Inflasi adalah proses peningkatan harga secara umum dan terus-menerus. Indikator yang digunakan untuk melihat inflasi adalah indeks harga konsumen, dimana indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam periode tertentu. Dalam indeks harga konsumen setiap jenis barang ditentukan suatu pertimbangan atau bobot tetap yang proporsional terhadap kepentingan relative dalam anggaran pengeluaran konsumen.¹⁰²

Data inflasi yang digunakan adalah data inflasi di indonesia yang diperoleh dari perhitungan IHK di indonesia dalam periode tahunan mulai 2015 sampai dengan 2019. Data diperoleh dari web Badan Pusat Statistik Indonesia. Perkembangan inflasi dapat dilihat dari grafik berikut:

Grafik 4.5
Inflasi



Sumber data Skunder (diolah, 2019)

¹⁰² *Ibid*, Hlm. 302

Grafik di atas merupakan perkembangan rata-rata perkembangan inflasi yang terjadi di Indonesia pada periode 2015 sampai dengan 2019, data perkembangan inflasi yang peneliti dapat dari web Badan Pusat Statistik Indonesia.. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Inflasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik cenderung mengalami kenaikan dan penurunan disetiap tahunnya.

4.4. Anlisa Data

4.4.1. Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menguji data memiliki sebaran normal atau tidak. Uji normalitas juga digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk mengujinya, dilakukan dengan uji statistik *non parametric Kolmoglov Smirnov*. Variabel tersebut normal jika Kolmogorof-Smirnov dan Untandardized residual Asymp. Sig (2-tailed) > 0,05 bearti lolos uji normalitas. Sebaliknya jika nilai Kolmogorof Smirnov dan Untandardized Residual Asymp. Sig (2-tailed) < 0,05 bearti tidak lolos uji normalitas.¹⁰³

¹⁰³ Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.(Bandung:Alfabeta), hal. 160.

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

	SBIS	FASBIS	KONSUMSI R.T	KONSUMSI PEMERINT AH	INFLASI	
N	18	18	18	18	18	
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	4,6552	2,0672	1,8747	3,0327	,3617
	Std. Deviation	3,61678	,55339	,20235	,79683	,31657
Most Extreme Differences	Absolute	,313	,144	,128	,113	,173
	Positive	,313	,144	,128	,113	,173
	Negative	-,190	-,081	-,105	-,104	-,158
Kolmogorov-Smirnov Z	1,327	,611	,541	,480	,733	
Asymp. Sig. (2-tailed)	,059	,850	,931	,975	,656	

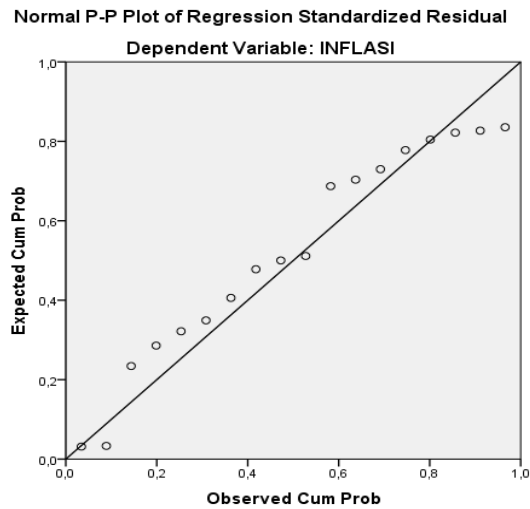
a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

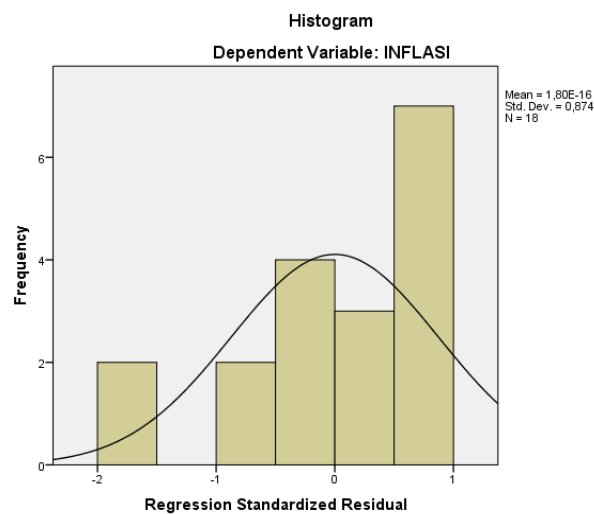
Hasil uji normalitas menunjukkan bahwa variabel-variabel dalam penelitian ini mempunyai sebaran distribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari hasil Asymp. Sig. (2-tailed) pada variabel SBIS (X_1) yaitu $0,059 > 0,05$, variable FASBIS (X_2) yaitu $0,850 > 0,05$, Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X_3) $0,931 > 0,05$, Tingkat Konsumsi Pemerintah (X_4) yaitu $0,975 > 0,05$ dan variabel Inflasi $0.656 > 0.05$.

Gambar 4.1
Uji Normalitas P-Plot



Pada Gambar 4.5 Uji Normalitas P-Plot dapat diketahui bahwa data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka data terdistribusi dengan normal dan model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Grafik 4.6
Uji Normalitas



Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan grafik histogram memberikan pola yang seimbang atau pola distribusi yang melenceng

ke kanan yang artinya berdistribusi normal. grafik ini menunjukkan bahwa model regresi sesuai dengan asumsi normalitas dan layak digunakan.

2. Uji Multikolinearitas

Penguji ini bertujuan untuk mengetahui apakah tiap-tiap variabel saling berhubungan secara linear. Uji Multikolinearitas dapat dilihat dari *variance inflation factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Kedua ukuran ini menunjukkan sikap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel independen lainnya.¹⁰⁴ Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* > 0.10 atau sama dengan VIF < 10. Jika nilai VIF tidak ada yang melebihi 10, maka dapat dikatakan bahwa multikolinearitas yang terjadi tidak berbahaya (lolos uji multikoliearitas).¹⁰⁵

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Toleranc e	VIF
(Constant)	-,103	,928		-,111	,914		
SBIS	,018	,024	,210	,757	,463	,589	1,698
FASBIS	-,069	,194	-,120	-,356	,728	,397	2,520

¹⁰⁴ AZUAR Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* (Bandung :Citapustaka Media Perintis, 2013), h. 66

¹⁰⁵ Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP), h.95

KONSUMSI R.T	-,161	,541	-,103	-,297	,771	,380	2,630
KONSUMSI MASYARAKAT	,271	,105	,682	2,588	,023	,653	1,531

a. Dependent Variable: INFLASI

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

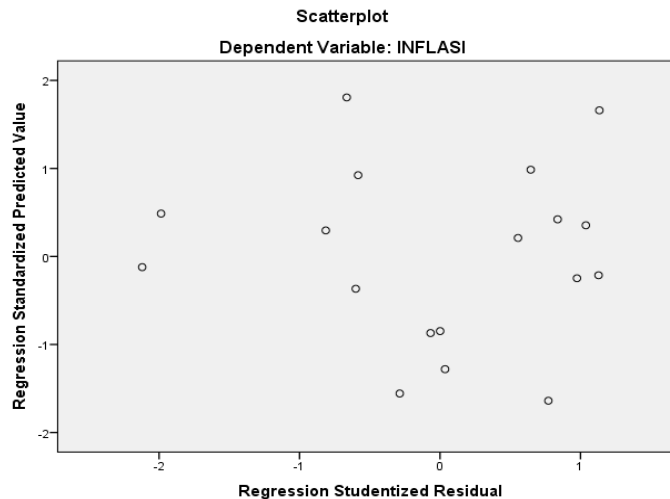
Berdasarkan Tabel 4.3 diketahui bahwa nilai Tolerance variabel SBIS (X_1) 0,589 lebih besar dari 0.1, FASBIS (X_2) 0,397 lebih besar dari 0.1, Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X_3) 0,380 lebih besar dari 0.1 dan Tingkat Konsumsi Pemerintah (X_4) 0,653 lebih besar dari 0.1. Sementara itu, nilai VIF variabel SBIS (X_1) sebesar 1.698 lebih kecil dari 10, FASBIS (X_2) sebesar 2.520 lebih kecil dari pada 10, Tingkat Konsumsi Rumah Tangga (X_3) 2,630 lebih kecil dari pada 10, dan Tingkat Konsumsi Pemerintah (X_4) 1,531 lebih kecil dari pada 10. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi multikolonieritas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variabel dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variabel residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut komokedastisitas, jika varians berbeda disebut heteroskedastisitas.¹⁰⁶

¹⁰⁶ Azuar Zuliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis*, h.171

Gambar 4.2
Uji Heterokedastisitas



Berdasarkan gambar 4.5 terlihat titik-titik pada grafik plot menyebar atau tidak membentuk pola tertentu. Artinya tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi yang digunakan.

4. Uji Autokolerasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah didalam sebuah model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi kolerasi, maka dinamakan ada problem autokorelasi. Autokorelasi akan muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain.¹⁰⁷ Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk Uji Autokorelasi tingkat 1 (*firse order autocoretation*) dan mensyaratkan adanya intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi di antara variabel penjelas.

¹⁰⁷ *Ibid.*

Tabel 4.4**Hasil Uji Autokolerasi****Model Summary^b**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics					Durbin-Watson
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change	
1	,640 ^a	,410	,228	,27816	,410	2,255	4	13	,119	2,552

a. Predictors: (Constant), KONSUMSI MASYARAKAT, SBIS, FASBIS, KONSUMSI R.T

b. Dependent Variable: INFLASI

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Berdasarkan tabel 4.3 output spss diatas nilai Durbin Watson yaitu 1.458 nilai tersebut berada diantara $du < d < 4 - dl$ atau $du < DW < 4 - dl$ ($1,8719 < 2,552 < 3,1796$), artinya tidak ada autokorelasi positif atau negatif.

4.4.2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda. Regresi adalah alat analisis yang digunakan untuk mengukur seberapa jauh pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Adapun variabel yang akan diteliti adalah SBIS (X1), FASBIS (X2), Konsumsi Rumah Tangga (X3), Konsumsi Pemerintah (X4) dan Inflasi (Y).

Tabel 4.5
Perhitungan Hipotesis Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,103	,928		-,111	,914
SBIS	,018	,024	,210	,757	,463
FASBIS	-,069	,194	-,120	-,356	,728
KONSUMSI R.T	-,161	,541	-,103	-,297	,771
KONSUMSI MASYARAKAT	,271	,105	,682	2,588	,023

a. Dependent Variable: INFLASI

Sumber Data Skunder, (diolah, 2019)

Berdasarkan hasil regresi linier berganda diatas didapatkan model persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = -0,103 (\text{constan}) + 0,018 (X_1) + (-0,069 (X_2)) + (-0,161 (X_3)) + 0,271 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi di atas maka dapat dijelaskan:

1. Nilai koefisien SBIS sebesar 0,081, artinya jika variabel SBIS mengalami peningkatan sebesar 1 % maka Inflasi akan menurun sebesar 0,081 persen dengan asumsi variabel lain konstan.

2. Nilai koefisien FASBIS sebesar -0,069, artinya jika variabel FASBIS mengalami peningkatan sebesar 1% maka Inflasi akan meningkat sebesar -0,069 persen dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Nilai koefisien Konsumsi Rumah Tangga sebesar -0,161, artinya jika variabel Konsumsi Rumah Tangga mengalami peningkatan sebesar 1% maka Inflasi akan meningkat sebesar -0,161 persen dengan asumsi variabel lain konstan.
4. Nilai koefisien Konsumsi Pemerintah sebesar 0,271, artinya jika variabel Konsumsi Pemerintah mengalami peningkatan sebesar 1% maka Inflasi akan menurun sebesar 0,271 persen dengan asumsi variabel lain konstan.
5. Dalam persamaan koefisien regresi diatas, konstanta (α) sebesar -0,103, hal ini berarti jika variabel SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah memiliki nilai 0 maka variabel Y (Inflasi) tetap sebesar -0,103%.

4.4.3. Uji Hipotesis

Untuk menganalisis apakah hipotesis diterima atau ditolak, maka dapat dilihat dari nilai probabilitasnya. Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesisnya yaitu:¹⁰⁸

Nilai keputusan berdasarkan nilai probabilitas :

1. Jika signifikan $t < \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$, maka H_0 ditolak, H_a diterima (berarti ada pengaruh).
2. Jika signifikan $t > \text{tingkat kesalahan} (\alpha = 0,05)$, maka H_0 diterima, H_a ditolak (berarti tidak ada pengaruh)

Pengujian hipotesis terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut:

¹⁰⁸Azuar Juliandi dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif untuk Ilmu-Ilmu Bisnis, ...*, hal. 176

1. Pengujian secara Parsial (uji t)

Uji t bertujuan untuk menguji pengaruh masing-masing variabel independen (SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga, Konsumsi Pemerintah) terhadap variabel dependen (Inflasi). Hasil pengujiannya yakni:

Tabel 4.5

Perhitungan Hipotesis Uji T

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-,103	,928		-,111	,914
SBIS	,018	,024	,210	,757	,463
FASBIS	-,069	,194	-,120	-,356	,728
KONSUMSI R.T	-,161	,541	-,103	-,297	,771
KONSUMSI MASYARAKAT	,271	,105	,682	2,588	,023

a. Dependent Variable: INFLASI

Sumber Data Sekunder, (diolah, 2019)

Berdasarkan tabel uji t diatas dapat dijelaskan:

1. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel SBIS adalah 0,018. Karena nilai probabilitas SBIS $0,018 < 0,05$, maka H_{01} ditolak dan H_{a1} diterima . sehingga

dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara SBIS dengan variabel Inflasi adalah tidak berpengaruh.

2. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel FASBIS adalah 0,728. Karena nilai sig. FASBIS $0,728 > 0,05$, maka H_{02} diterima dan H_{a2} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara FASBIS terhadap Inflasi adalah tidak berpengaruh
3. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Konsumsi Rumah Tangga adalah 0,771. Karena nilai probabilitas Konsumsi Rumah Tangga $0,771 > 0,05$, maka H_{03} diterima dan H_{a3} diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Konsumsi Rumah Tangga dengan variabel Inflasi adalah tidak berpengaruh.
4. Nilai probabilitas atau Sig. dari variabel Konsumsi Pemerintah adalah 0,23. Karena nilai probabilitas Konsumsi Pemerintah $0,23 > 0,05$, maka H_{04} di terima dan H_{a4} ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa pengaruh yang terjadi antara Konsumsi Pemerintah dengan variabel Inflasi adalah tidak berpengaruh.

2. Pengujian secara Simultan (uji F)

Uji F dilakukan untuk menguji model penelitian apakah perubahan variabel SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi tahun 2015-2019. Uji F dilakukan dengan menggunakan program SPSS, dapat dilihat pada tabel berikut dengan tingkat sig.5% (0,05).

Tabel 4.6
Hasil Perhitungan Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,698	4	,174	2,255	,119 ^b
1 Residual	1,006	13	,077		
Total	1,704	17			

a. Dependent Variable: INFLASI

b. Predictors: (Constant), KONSUMSI MASYARAKAT, SBIS, FASBIS, KONSUMSI R.T

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Hasil pada tabel diperoleh nilai probabilitas atau signifikan sebesar 0,119 > 0,05 tingkat sig. ($\alpha=5\%=0,05$). Maka H_{05} ditolak dan H_{a5} yang artinya ada pengaruh antara SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah terhadap Inflasi. Dengan demikian hasil analisis data dalam penelitian ini adalah bahwa SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi tahun 2015-2019.

3. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien Determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas.¹⁰⁹

¹⁰⁹Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS,*, h. 87

Tabel 4.7
Hasil Uji Koefisien Determinasi R²
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,640 ^a	,410	,228	,27816

a. Predictors: (Constant), KONSUMSI MASYARAKAT, SBIS, FASBIS, KONSUMSI R.T

b. Dependent Variable: INFLASI

Sumber data Skunder (diolah, 2019)

Tabel diatas menunjukkan besarnya *Adjusted R Square* adalah 0,228 hal ini berarti Inflasi dapat dijelaskan oleh variabel SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah sebesar 22,8% sedangkan sisanya (100%-22,8%=77,2%) dijelaskan oleh variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini.

4.5. Analisis Hasil Penelitian

4.5.1. Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah terhadap Inflasi di Indonesia

Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012) yang berjudul “Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Periode 2000:1-2011:4”. Penelitiannya menggunakan metode OLS menyimpulkan bahwa, variabel PDB

dan SBI berpengaruh positif dan signifikan terhadap inflasi, variabel JUB (M2) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap inflasi sedangkan variabel kurs berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap inflasi.

Semakin tinggi daya beli sertifikat bank indonesia syariah menunjukkan semakin tinggi masyarakat dalam menabung untuk menghemat kebutuhan masyarakat diakan datang, sebaliknya semakin rendah daya beli sertifikat bank indonesia syariah menunjukkan kurangnya hasil pendapatan dalam masyarakat. Semakin tinggi sertifikat bank indonesia syariah maka laba perusahaan mempunyai kemungkinan untuk meningkat dengan catatan bahwa bank indonesia tersebut mampu menyalurkan kreditnya dengan optimal.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh sertifikat bank indonesia syariah terhadap inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini merupakan kabar bagus bagi investor yang ingin berinvestasi untuk membeli sertifikat bank indonesia syariah. *Sertifikat bank indonesia* digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan bank dalam menyalurkan sertifikat syariah yang dihimpun oleh bank. *Indonesia sertifikat bank indonesia syariah* berpengaruh terhadap inflasi. Berpengaruhnya sertifikat bank indonesia syariah karena tidak adanya masyarakat menabung/membeli sertifikat syariah namun apabila banyaknya masyarakat menabung dalam membeli sertifikat syariah maka akan menghematkan pendapatan dimasa yang akan datang. Jika rendah sehingga mempengaruhi inflasi Semakin tinggi sertifikat bank indonesia syariah memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan bank dalam menyalurkan kreditnya. Secara teoritis, naiknya sertifikat bank indonesia syariah tentu akan

memperbesar peluang bank indonesia dalam memperoleh kenaikan pendapatan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian P Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012).

4.5.2. Analisis Pengaruh Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah (FASBIS) Terhadap Inflasi

Khairina Tambunan (2016) yang berjudul “Nilai Reksa dana Konvensional Reksadana Syariah Fasilitas Simpanan Pada Bank Indonesia Syariah (FASBIS) ZIS (Zakat, Infak Dan Sedekah) Produk Domestik Bruto Periode Sebelumnya”. Penelitiannya menggunakan GDP Riil metode Ordinary Least Square (OLS) Hasil penelitian secara serempak menunjukkan bahwa sekitar 97,2% variabel Reksadana Syariah, Reksadana Konvensional, FASBIS, ZIS dan PDB periode sebelumnya mempengaruhi PDB riil Indonesia sebagai indikator pertumbuhan ekonomi periode 2013-2015, sedangkan sisanya 2,8% dijelaskan oleh faktor-faktor lain. Reksadana konvensional memberi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, Reksadana Syariah memberikan pengaruh positif terhadap PDB riil Indonesia, FASBIS memberi pengaruh negatif terhadap perekonomian Indonesia, ZIS memberi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia, dan PDB periode sebelumnya juga memberi pengaruh positif terhadap perekonomian Indonesia. Secara parsial, reksadana syariah yang belum terlihat mempengaruhi secara signifikan.

4.5.3. Analisis Pengaruh Tingkat Konsumsi Rumah Tangga terhadap Inflasi di Indonesia

Selanjutnya, hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Bagus Widyanto

(2008) yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Konsumsi Rumah Tangga”. Penelitiannya menggunakan metode regresi linier berganda menyimpulkan bahwa hasil studi menunjukkan bahwa variabel pendapatan, tingkat pendidikan, jumlah anggota keluarga dan jarak tempat tinggal mempunyai pengaruh.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh konsumsi rumah tangga terhadap inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini merupakan kabar kurang mengembirakan bagi masyarakat dikarenakan dengan berpengaruhnya konsumsi rumah tangga dengan inflasi dapat menyebabkan daya beli rumah tangga menurun dari sebelum-sebelumnya. Namun konsumsi rumah tangga setiap tahun mampu memberikan peningkatan terhadap inflasi sehingga konsumsi rumah tangga berpengaruh terhadap inflasi. Hal ini dikarenakan *konsumsi rumah tangga* yang tinggi dapat berpengaruh tidak mampu menjadi acuan bahwa konsumsi masyarakat tidak berbelanja akan tetapi tetap berbelanja meskipun pada saat laju inflasi. Sehingga tidak akan berpengaruh terhadap inflasi. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyu Bagus Widyanto (2008)

4.5.4. Analisis Pengaruh Tingkat Konsumsi Pemerintah terhadap Inflasi di Indonesia

Hasil penelitian selanjutnya adalah Nurhayati dan Rachman (2003), dengan judul “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi fungsi konsumsi masyarakat di propinsi Jawa Tengah pada tahun 2000”, dalam penelitiannya menggunakan metode regresi linier berganda dengan variabel pendapatan nasional, jumlah penduduk dan inflasi. Dari hasil uji hipotesis diperoleh hasil

bahwa pendapatan nasional mempunyai pengaruh positif terhadap pengeluaran konsumsi masyarakat pada tingkat = 1% dan hasil regresi yang diperoleh adalah nilai koefisien sebesar 0,403 yang menunjukkan bahwa setiap kenaikan 1 juta rupiah pendapatan nasional akan menyebabkan pengeluaran konsumsi masyarakat naik sebesar 0,403 juta rupiah. Hubungan tersebut sesuai dengan teori yang ada dimana fungsi konsumsi menunjukkan hubungan antara konsumsi dan tingkat pendapatan apa bila pendapatan meningkat maka konsumsi juga akan meningkat.

Penelitian ini membuktikan bahwa terdapat pengaruh konsumsi masyarakat terhadap inflasi. Hal ini mengindikasikan bahwa penelitian ini merupakan kabar bagus bagi pemerintah dimana pemerintah dapat berbelanja produk lain dengan terjadinya inflasi. *Konsumsi pemerintah* digunakan untuk menunjukkan tingkat kemampuan berbelanja masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Konsumsi pemerintah berpengaruh terhadap inflasi. Berpengaruhnya konsumsi pemerintah karena naiknya harga-harga disetiap barang dan jasa sehingga berakibat pertumbuhan masyarakat rendah sehingga mempengaruhi inflasi. Semakin tinggi konsumsi masyarakat memberikan indikasi semakin tingginya kemampuan dalam berbelanja sehingga dapat menurunkan inflasi, naiknya konsumsi masyarakat tentu akan dapat mengatasi tidak terjadinya inflasi sehingga daya beli masyarakat bisa kembali normal.. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Nurhayati dan Rachman (2003).

4.5.5. Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah terhadap Inflasi

Berdasarkan hasil uji F $0,119 > 0,05$ tingkat sig. ($\alpha = 5\% = 0,05$) dapat disimpulkan bahwa SBIS, FASBIS, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah berpengaruh secara simultan terhadap Inflasi. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Primawan Wisda Nugroho dan Maruto Umar Basuki (2012) , Wahyu Bagus Widyanto (2008), Nurhayati dan Rachman (2003), dan Khairina Tambunan (2016) yang berpendapat bahwa Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah berpengaruh terhadap Inflasi secara simultan.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data melalui pembuktian terhadap hipotesis mengenai Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah terhadap Inflasi yang telah dijelaskan pada BAB IV, maka dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Sertifikat Bank Indonesia Syariah secara parsial tidak berpengaruh namun signifikan terhadap Inflasi tahun 2015-2019.
2. Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Inflasi tahun 2015-2019.
3. Konsumsi Rumah Tangga secara parsial berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Inflasi tahun 2015-2019.
4. Konsumsi Pemerintah secara parsial tidak berpengaruh namun tidak signifikan terhadap Inflasi tahun 2015-2019.
5. Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga dan Konsumsi Pemerintah secara simultan berpengaruh terhadap Inflasi tahun 2015-2019.
6. Berdasarkan uji Determinasi menunjukkan bahwa nilai *Adjusted R Square* sebesar 22,8% yang dipengaruhi oleh Sertifikat Bank Indonesia Syariah, Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah, Konsumsi Rumah Tangga dan

Konsumsi Pemerintah sedangkan sisanya sedangkan sisanya 77,2% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model regresi.

5.2. Saran

Peneliti menyadari masih banyak kekurangan dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Berdasarkan hasil penelitian, pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut:

1. Penelitian berikutnya disarankan menambah variabel independen yang dapat mempengaruhi Inflasi sukuk, giro wajib minimum dan lain-lain.
2. Penelitian selanjutnya sebaiknya dirancang lebih mendalam lagi, mengenai hal-hal yang menyebabkan inflasi, faktor-faktor terjadinya inflasi, cara menanggulangi inflasi dan lain sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hamid, “*Teori Konsumsi Islam dalam Peningkatan Ekonomi Umat*”, Dalam Jurnal j-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 2018
- Adiwarman karim, *Ekonomi Makro Islam*,(Jakarta: Rajawali Pers. Edisi Kedua,2017)
- Adrian Sutawijaya, Zulfahmi, *Pengaruh Faktor-Faktor Ekonomi Terhadap Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Organisasi Dan Manajemen, Vol 8, NO. 2, September 2012
- Agus Budi Santosa, “*Analisis Inflasi Di Indonesia*”, Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank Ke-3 (Sendi_U 3) 2017.
- Ahmad Muslim, *Peranan Konsumsi Dalam Perekonomian Indonesia Dan Kaitannya Dengan Ekonomi Islam*, Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial, Vol . 1, No. 2,September 2011
- Albert Kurniawan, “*Metode Riset Untyk Ekonomi Dan Bisnis*”, (Bandung: Alfabeta, 2014)
- Andri Soemitra, “*Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*”, (Depok : Kencana, 2017)
- Ascarya, *Seri Kebanksentralan: Instrumen-Instrumen Pengendalian Moneter*,(Jakarta: Bank Indonesia,2012)
- Azuar Juliandi Dan Irfan, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis* (Bandung :Citapustaka Media Perintis, 2013)
- Baginda Persaulian, Hasdi Aimon, Ali Anis, *Analisis Konsumsi Masyarakat Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Januari 2013, Vol. I, No. 02,
- Bambang Wijayanta & Aristanti Widyaningsih, “*Ekonomi & Akuntansi: Mengasah Kemampuan Ekonomi*”, (Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama, 2007)
- Budiono, “*Ekonomi Moneter*”, (Yogyakarta: Penerbit BPFE UGM, 2009)
- Dedi Rosdi, “*Ekonometrika Dan Analisis Runtun Waktu Terapan Dengan Eviews*” (Yogyakarta : Ndi Offset,2012)
- Dendy S, Tanti N, Deni L , “*Analisis Pengaruh Instrumen Moneter Syariah Dan Konvensional*”, dalam Jurnal Al-Muzara’ah, Vol. 4 No.1 Tahun 2016

Desi Nurmaida, “*Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi*”, Dalam Jurnal J-EBIS Vol. 3 No. 2 Juni 2018

Dimas Prabowo, “*Analisis Pengaruh Inflasi, Sertifikat Bank Indonesia Syariah (Sbis), Dan Jumlah Uang Beredar (Jub) Terhadap Indeks Syariah Yang Terdaftar Di Indeks Saham Syariah Indonesia (Issi)*”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013

Efisiensi Bank Pembangunan Daerah..., Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015.

Engla Desnim Silvia, Dkk, *Analisis Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Dan Inflasi Di Indonesia*, Jurnal Kajian Ekonomi, Vol. I, No. 02 Januari 201

Farah Fauziyah, “*Efisiensi Bank Pembangunan Daerah...*”, Dalam Jurnal Signifikan Vol. 4 No. 1 April 2015

G.A. Diah Utari, Retni Cristina S, Sudiro Pambudi, “*Inflasi Di Indonesia : Karakteristik Dan Pengendaliannya*”, (Jakarta : BI Institute, 2016), Hlm. 5
Herlan Firmansyah, Dkk., “*Advanced Learning Economics 2 For Grade XI Social Sciences Programme*”, (Bandung: Grafindo Media Pratama, 2014)

https://www.academia.edu/8038591/Kebijakan_Moneter_Syariah

https://www.bi.go.id/id/peraturan/moneter/Documents/se_174315.pdf

Idris Parakkasi, “*Inflasi Dalam Perspektif Islam*”, Dalam Jurnal Laa Maisyir, Vol 3, NO. 1, Juni 2016

Imam Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS* (Semarang, Badan Penerbit UNDIP)

Judisseno, “*Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia*”, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2002)

M.Fikri, Amri Amir, Erni Achmad, *Analisis Konsumsi Masyarakat Indonesia Sebelum dan Setelah Krisis Ekonomi*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, Vol. 1 No. 2, Oktober 2013

Muana Nanga, “*Makro Ekonomi: Teori, Masalah Dan Kebijakan*”, (Jakarta: Rajawali Pers, 2005)

Muhammad , *Kebijakan Moneter dan Fiskal dalam Ekonomi Islami*, (. Jakarta: Salemba Empat, 2012)

- Muhammad Rafiq, “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia Tahun 2001:T1-2010:T4*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung Bandar Lampung 2016
- Nanang Martono, “*Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)
- Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng, “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado*” Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Novia Hadji Ali, Deasy Engka, Steeva Tumangkeng, “*Pengaruh Pengeluaran Konsumsi Dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Manado*” Fakultas Ekonomi, Jurusan Ekonomi Pembangunan, Universitas Sam Ratulangi, Manado
- Nurlaila Hanum, “*Analisis Pengaruh Pendapatan Terhadap Prilaku Konsumsi Mahasiswa universitas Samudradi Kota Langsa*”, Dalam JURNAL SAMUDRA EKONOMIKA, VOL. 1, NO. 2 OKTOBER 2017
- Nursantri Yanti, “*Pengaruh SBI, SBIS, Inflasi Dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap transaksi Pasar Uang Antar Bank Syariah*”, Dalam Jurnal At-Tawassuth, Vol.III, No. 1, 2018
- Nurul Huda, “*Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*”, (Jakarta: Kencana, 2008)
- Paul A Samuelson & William D.Nordhaus, “*Economics (Ekonomi), terj.Jaka Wasana*”, (Jakarta: Erlangga, 1988)
- Pratama Rahardja, Mandala Manurung, “*Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi & Makroekonomi) Edisi Ke Tiga*”, (Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia,, 2008)
- Rahmad Dahlan, “*Pengaruh Tingkat Bonus Sbis Dan Tingkat Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Bank Syariah Di Indonesia*”, Dalam Jurnal EQUILIBRIUM, Vol. 3, No. 1, Juni 2015
- Repository. Uinsu.ac.id
- Siti Rahmiana, “*Analisis Dampak Kebijakan Moneter Bank Indonesia, Konsumsi Daerah, Investasi Daerah Dan Suku Bunga Kredit Investasi Daerah Terhadap Inflasi Di Provinsi Lampung*”, Skripsi, Lampung, 2016

- Sofian Siregar, “*Statistik Parametrik Untuk Penelitian Kuantitatif*”, (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012)
- Sugiyono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*.(Bandung:Alfabeta),
- Suliyanto, “*Metode Riset Bisnis*”, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2006)
- Suparmoko, “*Pengantar Ekonomi Makro*”, (Yogyakarta: BPFE, 1998)
- Suseno, Siti Astiyah, “*Inflasi*”, (Jakarta : Pusat Pendidikan Dan Studi Kebanksentralan (PPSK) BI, 2009)
- Tri Inda Fadhila Rahma, “*Pengaruh Inflasi dan Suku Bunga*”, Dalam Jurnal j-EBIS Vol. 3 No. 1 April 2018
- Triyanto, “*Analisis Pengaruh Konsumsi Pemerintah, Ekspor, Tabungan Domestik Dan Penanaman Modal Asing Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia*”, Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2009
- Umer chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Terjemahan Ikhwan Abidin B, Jakarta: Gema Insani Press,2010)
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Bank Indonesia.
- Wiratna Sujarweni, “*SPSS Untuk Penelitian*”, (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

1. Nama Lengkap : Mutia Maulida
2. Nim : 4022015021
3. Tempat/Tanggal Lahir : Peureulak, 29 September 1998
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Alamat : Desa Leuge, Kec. Peureulak Kota
Kab. Aceh Timur

II. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tamatan SD Negeri 02 Peureulak Berijazah Tahun 2009
2. Tamatan MTsS Nurul Ulum Peureulak Berijazah Tahun 2012
3. Tamatan SMA Plus Nurul Ulum Peureulak Berijazah Tahun 2015

III. RIWAYAT ORGANISASI

1. PDPT PII Kota Langsa (2016-Sekarang)
2. Himpunan Mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah FEBI IAIN Langsa (2016-2017)
3. Himpunan Pengusaha Muda Kota Langsa (HIMPI) (2018-Sekarang)

III. 1 POSISI OPERASI MONETER DAN TRANSAKSI PASAR UANG ¹
(Miliar Rp)

KETERANGAN	2017									2018
	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec		
1 Operasi Moneter	427,760	338,283	306,219	328,257	279,645	302,033	320,306	332,999	291,007	
2 1. Operasi Moneter (Konvensional)	383,146	305,438	273,576	296,514	251,804	263,103	286,228	299,121	243,822	
3 a. Operasi Pasar Terbuka (OPT)	281,615	197,488	142,014	231,615	174,723	176,241	207,302	223,816	153,598	
4 - Sertifikat Bank Indonesia	0	-	-	5,975	13,068	28,071	37,826	47,826	47,826	
5 1 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
6 3 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
7 6 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
8 9 Bulan	0	-	-	4,180	8,623	8,623	8,623	8,623	8,623	
9 12 Bulan	0	-	-	1,795	4,445	19,448	29,203	39,203	39,203	
10 - Sertifikat Deposit Bank Indonesia 2)	202,615	204,868	184,138	105,060	70,365	48,890	39,990	31,284	26,046	
11 1 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
12 3 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
13 6 Bulan	125,436	128,115	111,935	40,750	19,850	4,850	1,350	-	-	
14 9 Bulan	28,001	32,128	27,578	24,678	21,883	20,858	17,958	12,708	8,110	
15 12 Bulan	49,178	44,625	44,625	39,632	28,632	23,182	20,682	18,576	17,936	
16 - Term Deposit (d/h Fine Tune Kontraksi)	54,589	27,405	-	26,952	-	-	14,193	21,629	127,836	
17 - Reverse Repo Surat Berharga Negara 5)	41,510	42,398	44,065	93,628	91,290	99,280	115,293	127,028	43,627	
18 - Repo 7)	17,099	77,183	86,189	-	-	-	-	3,950	91,737	
19 b. Standing Facility	101,531	107,950	131,563	64,899	77,081	86,862	78,926	75,305	90,224	
20 - Deposit Facility (d/h Fasilitas Simpanan Bank Indonesia)	101,531	108,609	131,563	65,039	77,281	86,862	78,926	75,305	90,224	
21 - Lending Facility 3)	0	659	-	140	200	-	-	-	-	
22 2. Operasi Moneter (Syariah)	44,614	32,845	32,643	31,744	27,841	38,930	34,079	33,879	47,186	
23 a. Operasi Pasar Terbuka	16,239	17,752	14,467	17,880	16,792	18,012	18,812	19,405	14,595	
24 - Sertifikat Bank Indonesia Syariah	10,017	12,807	11,967	11,312	10,312	10,642	8,967	8,525	8,215	
25 1 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
26 3 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
27 6 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
28 9 Bulan	4,470	5,870	5,030	5,180	5,325	5,750	4,315	4,235	4,025	
29 12 Bulan	5,547	6,937	6,937	6,132	4,987	4,892	4,652	4,290	4,190	
30 - Sukuk Bank Indonesia	0	-	-	-	-	-	-	-	1,828	
31 1 Minggu	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
32 2 Minggu	0	-	-	-	-	-	-	-	1,828	
33 1 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
34 3 Bulan	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
35 - Reverse Repo Surat Berharga Negara Syariah 6)	6,222	4,945	2,500	6,568	6,480	7,370	9,845	10,880	4,552	
36 - Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
37 - Repo 8)	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
38 b. Standing Facility	28,375	15,093	18,176	13,864	11,049	20,918	15,267	14,474	32,591	
39 - Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	28,375	15,223	18,176	13,864	11,049	20,918	15,267	14,474	32,591	
40 - Financing Facility 4)	0	130	-	-	-	-	-	-	-	

1) Data per akhir periode.

2) Diterbitkan sejak tanggal 30 Agustus 2013

3) Dilakukan oleh Bank Konvensional surat berharga yang direpokan terdiri dari SBI, SDBI, dan SBN

4) Dilakukan oleh Bank Syariah surat berharga yang direpokan terdiri dari SBIS dan SBSN

5) Dilakukan oleh Bank Konvensional

6) Dilakukan oleh Bank Syariah

7) Dilakukan oleh Bank Konvensional

8) Dilakukan oleh Bank Syariah

III.1 POSITION OF MONETARY OPERATION AND TRANSACTION OF MONEY MARKET 1
(Billions of Rp)

Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	2019		ITEMS	
								Sep			
304,919	286,027	307,737	329,209	239,114	328,729	308,955	295,890	302,040		Monetary Operation	1
262,907	245,424	264,200	290,874	200,961	278,962	263,391	252,867	259,952		1. Monetary Operation (Conventional)	2
188,966	197,287	194,886	158,437	75,465	173,593	187,330	192,077	167,291		a. Open Market Operation (OMO)	3
77,826	83,576	106,756	102,576	98,133	99,633	99,338	103,438	90,935		- Bank Indonesia Certificate	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Month	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 Months	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 Months	7
8,623	8,623	8,623	4,443	-	-	-	-	-		9 Months	8
69,203	74,953	98,133	98,133	98,133	99,633	99,338	103,438	90,935		12 Months	9
15,611	10,351	3,250	1,250	900	-	-	-	-		- Bank Indonesia Deposits Certificate 2)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Month	11
-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 Months	12
-	-	-	-	-	-	-	-	-		6 Months	13
5,110	4,600	-	-	-	-	-	-	-		9 Months	14
10,501	5,751	3,250	1,250	900	-	-	-	-		12 Months	15
-	31,626	-	-	-	-	10,618	35,761	-		- Term Deposit (prev. Fine Tune Contraction) 3)	16
106,097	84,459	122,154	91,135	68,846	134,182	115,422	93,073	109,707		- Government Bond Reverse Repo 5)	17
10,568	12,725	37,274	36,524	92,414	60,222	38,048	40,195	33,351		- Repo 7)	18
73,941	48,137	69,314	132,438	125,496	105,369	76,061	60,790	92,661		b. Standing Facility	19
73,941	48,137	69,314	132,438	125,496	105,399	76,061	60,790	92,661		- Deposit Facility (prev. Bank Indonesia Deposit Facility)	20
-	-	-	-	-	30	-	-	-		- Lending Facility 3)	21
42,012	40,603	43,538	38,335	38,153	49,767	45,564	43,023	42,088		2. Monetary Operation (Sharia)	22
18,395	21,225	24,915	24,265	20,128	21,938	28,086	25,858	25,674		a. Open Market Operation (OMO)	23
10,895	12,725	14,415	13,849	14,124	13,604	12,989	11,534	11,394		- Sharia' Bank Indonesia Certificate	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-		1 Month	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-		3 Months	26
1,035	3,465	4,240	4,689	5,509	5,509	5,589	3,459	3,209		6 Months	27
5,125	4,795	5,680	5,305	4,915	4,605	4,290	4,570	5,030		9 Months	28
4,735	4,465	4,495	3,855	3,700	3,490	3,110	3,505	3,155		12 Months	29
7,500	8,500	10,500	10,500	6,675	8,334	15,097	14,324	14,280		- Bank Indonesia Sukuk	30
2,500	2,500	2,500	2,500	-	3,520	5,060	4,150	3,543		1 Week	31
3,000	4,000	4,000	4,000	2,245	2,740	6,008	6,555	5,535		2 Week	32
1,000	-	1,000	1,000	2,245	-	2,385	750	2,090		1 Months	33
1,000	2,000	3,000	3,000	2,185	2,074	1,644	2,869	3,112		3 Months	34
-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Sharia Government Bond Reverse Repo 6)	35
-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Bank Indonesia Wadiah Certificate	36
-	-	-	84	671	-	-	-	-		- Repo 8)	37
23,617	19,378	18,623	14,070	18,025	27,829	17,478	17,165	16,414		b. Standing Facility	38
23,617	19,378	18,623	14,070	18,025	27,829	17,478	17,165	16,414		- Bank Indonesia Sharia Deposits Facility	39
-	-	-	-	-	-	-	-	-		- Financing Facility 4)	40

1) End of period data.

2) Launched as of August 30th, 2013

3) Transaction by conventional banks, collateral consist of SBI, SDBI, and SBN

4) Transaction by sharia banks, collateral consist of SBIS and SBSN

5) Transaction by Conventional Banks

6) Transaction by Sharia Banks

7) Transaction by Conventional Banks

8) Transaction by Sharia Banks

III. 1 POSISI OPERASI MONETER DAN TRANSAKSI PASAR UANG 1
(Miliar Rp)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014							2015		
						Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
1 Operasi Moneter	484,392	505,591	429,139	324,873	410,189	457,982	410,189	424,949	442,123	426,727	346,694	327,623	326,970	339,976	287,143
2 1. Operasi Moneter (Konvensional)	472,064	484,712	410,043	302,954	378,839	432,698	378,839	399,835	415,134	400,949	321,365	303,372	306,385	319,892	265,442
3 a. Operasi Pasar Terbuka (OPT)	379,984	332,199	341,004	192,119	279,988	286,894	279,988	293,634	296,680	259,715	222,479	210,645	190,700	184,641	181,474
4 - Sertifikat Bank Indonesia	200,113	119,777	78,873	91,392	88,899	82,605	88,899	88,290	87,290	87,290	77,290	69,290	64,290	52,015	55,155
5 1 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6 3 Bulan	10,000	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7 6 Bulan	135,220	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 9 Bulan	54,893	119,777	78,873	91,392	88,899	82,605	88,899	88,290	87,290	87,290	77,290	69,290	64,290	52,015	52,770
9 12 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,385
10 - Sertifikat Deposito Bank Indonesia 2)	-	-	-	26,520	102,498	77,441	102,498	112,147	131,367	123,972	101,183	84,168	62,630	61,824	49,229
11 1 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12 3 Bulan	-	-	-	18,703	0	41,933	60,463	60,283	74,418	65,223	43,765	16,145	-	-	-
13 6 Bulan	-	-	-	7,817	102,498	35,508	42,035	51,864	56,950	58,750	54,418	61,181	54,058	47,653	35,058
14 9 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	3,000	6,842	8,572	14,171	14,171
15 12 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16 - Term Deposito (d/h Fine Tune Kontraksi)	172,646	154,381	180,798	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17 - Reverse Repo Surat Berharga Negara 5)	7,225	58,041	81,334	74,207	88,592	126,849	88,592	93,198	78,023	48,453	44,006	57,187	63,780	70,802	77,091
18 - Repo 7)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19 b. Standing Facility	92,080	152,512	69,040	110,835	98,851	145,804	98,851	106,201	118,454	141,234	98,887	92,727	115,686	135,252	83,968
20 - Deposito Fasilitas Simpanan Bank Indonesia	92,080	152,512	69,040	111,135	98,851	145,804	98,851	106,201	118,454	141,234	98,887	92,727	115,686	135,252	83,968
21 - Lending Fasilitas 3)	-	-	-	300	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 2. Operasi Moneter (Syariah)	12,328	20,879	19,096	21,919	31,350	25,284	31,350	25,114	26,990	25,778	25,329	24,251	20,585	20,083	21,701
23 a. Operasi Pasar Terbuka	3,152	3,476	3,514	5,652	9,372	7,671	9,372	8,497	9,816	9,410	9,530	10,450	8,865	8,778	10,247
24 - Sertifikat Bank Indonesia Syariah	3,152	3,476	3,455	4,712	8,130	6,530	8,130	8,050	9,040	8,810	9,130	8,858	8,458	8,163	8,585
25 1 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26 3 Bulan	1,576	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27 6 Bulan	1,576	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28 9 Bulan	-	3,476	3,455	4,712	8,130	6,530	8,130	8,050	9,040	8,810	9,130	8,858	8,458	8,163	8,335
29 12 Bulan	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250
30 - Reverse Repo Surat Berharga Negara Syariah 6)	-	-	59	940	1,242	1,141	1,242	447	776	600	400	1,593	408	615	1,662
31 - Sertifikat Wadiah Bank Indonesia	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32 - Repo 8)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33 b. Standing Facility	9,176	17,403	15,582	16,267	21,978	17,614	21,978	16,617	17,173	16,368	15,799	13,800	11,720	11,306	11,454
34 - Fasilitas Simpanan Bank Indonesia Syariah	9,176	17,403	15,582	16,267	21,978	17,614	21,978	16,617	17,173	16,368	15,799	13,800	11,720	11,306	11,454
35 - Financing Fasilitas 4)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- 1) Data per akhir periode.
2) Diterbitkan sejak tanggal 30 Agustus 2013
3) Dilakukan oleh Bank Konvensional surat berharga yang direpokan terdiri dari SBI, SDBI , dan SBN
4) Dilakukan oleh Bank Syariah surat berharga yang direpokan terdiri dari SBIS dan SBSN
5) Dilakukan oleh Bank Konvensional
6) Dilakukan oleh Bank Syariah
7) Dilakukan oleh Bank Konvensional
8) Dilakukan oleh Bank Syariah

III.1 POSITION OF MONETARY OPERATION AND TRANSACTION OF MONEY MARKET ¹
(Billions of Rp)

2015													2016		ITEMS	1
Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov		
277,544	253,693	262,589	191,123	298,797	355,550	383,592	355,780	359,016	320,086	361,986	363,647	290,579	359,953	405,419	Monetary Operation	1
254,748	232,852	241,912	166,442	276,738	331,502	359,659	332,161	334,493	296,512	333,935	335,902	256,695	327,543	370,098	1. Monetary Operation (Conventional)	2
158,568	163,940	162,238	72,387	187,435	219,700	263,945	280,728	256,193	161,916	269,415	245,541	145,059	262,571	280,977	a. Open Market Operation (OMO)	3
42,631	39,016	37,510	32,300	38,237	47,414	67,534	82,189	81,224	78,619	89,494	98,720	107,499	111,639	106,992	- Bank Indonesia Certificate	4
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Month	5
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Months	6
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Months	7
39,575	34,310	32,244	26,394	31,526	37,448	50,756	55,086	49,311	45,181	49,511	52,292	54,377	54,005	49,393	9 Months	8
3,056	4,706	5,266	5,906	6,711	9,966	16,779	27,104	31,914	33,439	39,984	46,429	53,123	57,635	57,600	12 Months	9
50,299	50,146	42,103	41,577	57,063	70,927	100,191	105,800	99,829	74,133	77,269	80,819	84,115	66,822	60,539	- Bank Indonesia Deposits Certificate 2)	10
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Month	11
3,625	8,070	12,870	12,574	35,350	53,056	84,036	86,563	77,827	50,903	47,716	44,301	56,292	34,635	27,265	3 Months	12
32,503	27,905	15,062	14,832	10,542	10,542	10,557	19,237	22,002	23,230	29,553	36,518	27,823	32,187	33,274	6 Months	13
14,171	14,171	14,171	14,171	11,171	7,329	5,599	-	-	-	-	-	-	-	-	9 Months	14
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 Months	15
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,087	64,598	- Term Deposit (prev. Fine Tune Contraction) 3)	16
65,639	74,778	82,625	5,345	92,136	101,359	96,220	92,739	75,140	9,164	102,652	66,002	20,096	43,023	48,848	- Government Bond Reverse Repo 5)	17
-	-	-	6,835	-	-	-	-	-	-	-	-	66,651	-	-	- Repo 7)	18
96,180	68,912	79,674	94,055	89,303	111,802	95,714	51,432	78,299	134,597	64,520	90,361	111,635	64,972	89,121	b. Standing Facility	19
96,180	68,912	79,784	94,575	89,303	111,802	95,714	51,432	78,299	134,597	64,520	90,361	111,635	64,972	89,121	- Deposit Facility (prev. Bank Indonesia Deposit Facility)	20
-	-	110	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Lending Facility 3)	21
22,796	20,841	20,677	24,682	22,060	24,048	23,933	23,619	24,523	23,574	28,052	27,745	33,884	32,410	35,322	2. Monetary Operation (Sharia)	22
9,091	7,910	7,080	6,680	7,905	9,468	8,100	10,069	9,285	9,322	10,582	11,297	12,744	14,240	15,514	a. Open Market Operation (OMO)	23
7,720	7,330	6,495	6,280	6,275	7,288	7,038	7,683	7,225	7,470	8,130	8,947	9,442	10,333	11,028	- Sharia' Bank Indonesia Certificate	24
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 Month	25
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 Months	26
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6 Months	27
7,245	6,740	5,775	5,460	5,355	6,043	5,793	6,188	5,380	5,550	5,960	6,227	6,722	6,932	6,597	9 Months	28
475	590	720	820	920	1,245	1,245	1,495	1,845	1,920	2,170	2,720	2,720	3,401	4,431	12 Months	29
1,371	580	585	400	1,630	2,180	1,062	2,387	2,060	1,852	2,452	2,350	3,302	3,908	4,487	- Sharia Government Bond Reverse Repo 6)	30
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Bank Indonesia Wadiah Certificate	31
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Repo 8)	32
13,705	12,931	13,597	18,002	14,155	14,580	15,834	13,550	15,238	14,252	17,469	16,449	21,140	18,170	19,807	b. Standing Facility	33
15,038	12,931	13,597	18,002	14,155	14,580	15,834	13,550	15,238	14,252	17,469	16,449	21,140	18,170	19,807	- Bank Indonesia Sharia Deposits Facility	34
1,333	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	- Financing Facility 4)	35

1) End of period data.
2) Launched as of August 30th, 2013
3) Transaction by conventional banks, collateral consist of SBI, SDBI, and SBN
4) Transaction by sharia banks, collateral consist of SBIS and SBSN
5) Transaction by Conventional Banks
6) Transaction by Sharia Banks
7) Transaction by Conventional Banks
8) Transaction by Sharia Banks

III. 1 POSISI OPERASI MONETER DAN TRANSAKSI PASAR UANG ¹
(Miliar Rp)

KETERANGAN	2010	2011	2012	2013	2014	2014							2015		
						Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May		Jun	Jul
1 Pasar Uang Antar Bank (PUAB)	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rupiah															
2 O/N (sesi pagi)	2,474	2,945	2,220	2,708	6,150	4,445	6,150	5,199	4,481	8,897	4,382	2,260	2,806	2,823	3,830
3 O/N (sesi sore)	1,566	2,086	5,610	1,399	2,996	4,132	2,996	3,297	5,241	10,729	5,190	5,855	6,701	2,405	2,997
4 Keseluruhan (sesi pagi)	3,503	3,842	5,682	6,188	8,457	6,650	8,457	7,149	8,289	11,912	7,902	4,891	7,486	4,901	7,494
5 Keseluruhan (sesi sore)	1,845	2,441	8,220	3,131	5,196	6,222	5,196	4,522	7,771	12,339	7,705	7,970	9,981	3,375	5,812
6 Pasar Uang Antar Bank (PUAB) Valas	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2)															
7 1 hari	216,000	164,000	21,000	50,000	60,000	-	60,000	-	-	180,500	-	-	239,000	10,000	257,000
8 Keseluruhan	238,000	533,500	341,800	475,500	493,000	490,000	493,000	74,500	182,000	192,500	453,839	408,500	256,000	231,400	291,100
9 Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah (PUAS)	-	50	728	750	200	290	200	400	1,055	700	860	860	1,335	520	352

1) Data transaksi pasar uang antar bank akhir periode
2) Volume dalam ribuan USD

III.1 POSITION OF MONETARY OPERATION AND TRANSACTION OF MONEY MARKET ¹
(Billions of Rp)

2015													2016				
Sep	Oct	Nov	Dec	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	ITEMS	1	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	IDR Interbank Call Money	1
3,520	2,895	1,870	7,527	4,390	3,370	2,581	2,995	2,920	2,162	2,935	2,790	1,675	2,337	1,670	1 Day Morning Session	2	
15,380	3,447	4,653	7,621	4,567	2,815	4,888	6,960	4,135	5,707	5,557	9,293	6,128	6,387	5,166	1 Day Afternoon Session	3	
6,025	5,787	5,420	11,157	8,070	5,246	6,056	6,150	5,085	5,937	5,901	5,050	3,165	4,640	3,279	All Maturities Morning Session	4	
18,973	6,717	6,438	9,971	8,229	4,095	7,774	9,797	7,619	8,959	9,837	12,718	10,551	9,182	6,361	All Maturities Afternoon Session	5	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	USD Interbank Call Money 2)	6
108,000	-	252,601	-	-	258,000	346,500	-	476,067	297,500	-	275,320	-	95,000	60,500	1 Day	7	
163,357	154,674	357,695	345,000	128,000	271,530	364,500	272,000	569,738	331,500	257,000	275,320	111,000	147,562	178,500	All Maturities	8	
1,217	625	1,173	530	167	153	680	788	758	1,223	941	1,050	1,166	878	592	Sharia Interbank Call Money	9	

1) End of period call money transaction
2) Volume in thousands USD